



BADAN KEUANGAN DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2020



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT



Kata Pengantar

Syukur Alhamdulillah kami ucapkan ke hadirat Allah SWT, karena atas Rahmat Allah Badan Keuangan Daerah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.

Sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 065/3979/ED/GSB-2019 tanggal 9 Desember 2019 perihal Penyampaian Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 dan Penyampaian Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2020, maka Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan unsur penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diwajibkan menyampaikan Laporan Kinerja OPD Provinsi.

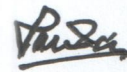
Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi kinerja Badan Keuangan Daerah yang didalamnya menguraikan rencana kerja yang telah ditetapkan, pencapaian atas rencana kinerja tersebut, dan realisasi anggaran. Dari pelaksanaan tahun keempat Renstra OPD Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 ini sudah menunjukkan keberhasilan, hal tersebut berkat buah pikiran dan kerja sama seluruh *stakeholders* pembangunan di Provinsi Sumatera Barat.

Tantangan dan masalah masih ditemukan sehingga ada sasaran yang belum tercapai secara maksimal, tetapi keyakinan dan optimisme yang tinggi senantiasa tetap dimiliki untuk lebih meningkatkan kinerja pada tahun tahun mendatang.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan dukungan dalam penyusunan Laporan Kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 ini, semoga laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi media komunikasi penyampaian kinerja OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Padang, Januari 2021

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT



ZAENUDIN, SE, MM

Daftar Isi

	<i>Hal</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR GRAFIK	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Organisasi	2
C. Aspek Strategis Organisasi.....	5
D. Permasalahan Utama (Isu Strategis).....	9
BAB II	
PERENCANAAN KINERJA	11
BAB III	
AKUNTABILITAS KINERJA	27
A. Metode Pengukuran	27
B. Hasil Pengukuran Kinerja	30
C. Capaian Kinerja	31
D. Realisasi Anggaran	50
E. Inovasi	68
F. Evaluasi Kinerja	68
BAB IV	
PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Langkah – Langkah di Masa Mendatang	71
LAMPIRAN	

Daftar Tabel

	<i>Hal</i>
1.1. Komposisi PNS Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat menurut Pendidikan, Pangkat, dan Golongan serta Jabatan Kondisi 31 Desember 2020	5
1.2 Keterkaitan RPJMD dengan Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat	7
1.3 Keterkaitan antara RPJMD Provinsi Sumatera Barat dengan Renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat	8
1.4 Tujuan Renstra 2016 - 2021 Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat	8
1.5 Indikator Kinerja Umum Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Tugas, Pokok, dan Fungsi Badan Keuangan Daerah Tahun 2020	9
2.1 Penetapan Kinerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2020	13
2.2 Program, Kegiatan, dan Indikator Kinerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2020	18
3.1 Penilaian Kinerja	29
3.2 Pengukuran Kinerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2020	31
3.3 Capaian Kinerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2020	31
3.4 Pengukuran Kinerja Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2020 ..	32
3.5 Pengukuran Kinerja Meningkatnya Kualitas APBD Kabupaten/Kota Tahun 2020	40
3.6 Pengukuran Kinerja Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020	42
3.7 Target, Realisasi, dan Kontribusi Rincian PAD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020	43
3.8 Perbandingan Peningkatan PAD Tahun 2016 - 2020	43
3.9 Perkembangan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2016 - 2020	46
3.10 Pengukuran Kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	49
3.11 Nilai Evaluasi Akuntabilitas	54
3.12 Realisasi Belanja Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	51
3.13 Realisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2020	52
3.14 Capaian Kinerja Program/Kegiatan Sesuai Dokumen Anggaran	53

Daftar Gambar

	<i>Hal</i>
1.1 Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat	4
2.1 SAKIP	11
3.1 Penghargaan Pemerintah RI Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat atas Capaian Opini WTP Lima Tahun Berturut-turut (2013 - 2017)	33
3.2 Screenshot Whatsapps Group Helpdesk SIPKD	38
3.3 Website Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat	66
3.4 Aplikasi SIPKD Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera	67
3.5 Sistem Aplikasi e-Samsat	67

Daftar Grafik

	<i>Hal</i>
3.1 Peningkatan PAD Tahun 2016 - 2020	44
3.2 Perkembangan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2016 - 2020	47

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Tahun 2016-2021 dan Rencana Kinerja Tahunan 2020 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2020. Penyusunan Laporan Kinerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2020 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2020. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan daerah dan implementasi berbagai kebijakan daerah yang menitikberatkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*), sebagaimana termuat dalam TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang ditindaklanjuti dengan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Seiring dengan upaya merealisasikan penyelenggaran Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Badan Keuangan Daerah telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan daerah maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang diharapkan dapat dicapai untuk 5 (lima) tahun mendatang. Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh Badan Keuangan Daerah adalah *pertama* : Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Daerah; *kedua* : Meningkatnya Pendapatan Daerah; dan *ketiga* : Meningkatnya Kinerja Organisasi

Selanjutnya dari tujuan tersebut maka sasaran yang ditetapkan adalah *Pertama* : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dengan indikator Opini BPK dengan

target WTP. *Kedua* : Meningkatnya kualitas APBD Kabupaten/Kota yang ditandai dengan meningkatnya persentase Kab/Kota dengan Opini WTP. *Ketiga* : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah ditandai dengan indikator persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan target -8,47% dengan realisasi -3,31%. *Keempat* : Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator Indeks Kepuasan masyarakat dengan tingkat kepuasan baik. *Kelima* : Meningkatnya tata kelola organisasi dengan indikator kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja bernilai A.

Program dan kegiatan Badan Keuangan Daerah Tahun 2020 ini merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, visi dan misi seperti yang tertuang dalam Renstra Badan Keuangan Daerah Tahun 2016-2021 dan Renja Badan Keuangan Daerah, serta dalam rangka menjawab isu-isu aktual dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Isu-isu tersebut antara lain: reformasi birokrasi, sistem pengendalian intern pemerintahan, standar pelayanan minimal, sistem operasional prosedur, teknologi informasi, manajemen kinerja, pemberantasan korupsi, pelayanan publik, manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi, serta diklat aparatur pengelola keuangan berbasis kompetensi.

Berdasarkan uraian Laporan Kinerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2020, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Capaian kinerja sasaran secara fisik rata-rata sebesar 100% untuk semua capaian program yang telah dilaksanakan yaitu 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur; 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; 6) Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah; 7) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota; 8) Program Peningkatan Pendapatan Daerah; dan 9) Program Peningkatan Pelayanan Publik;
2. Adapun pencapaian kinerja input/penyerapan anggaran Badan Keuangan Daerah Tahun 2020 terhadap Belanja Langsung adalah sebesar 92,39% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 30.77.113.335,-. Capaian kinerja input tertinggi Belanja Langsung Urusan terdapat pada Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota sebesar 96,21% dan diikuti dengan Program Peningkatan Pelayanan Publik 91,90%, lalu Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan 90,78% dan yang terendah Program Peningkatan Pendapatan Daerah 89,45%.

3. Pelaksanaan Program dan Kegiatan sebagaimana point diatas telah memberikan kontribusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Sasaran dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Realisasi Opini BPK yang digunakan adalah realisasi kinerja tahun sebelumnya, sebab opini tersebut penilaiannya dilakukan pada waktu tahun anggaran pengukuran kinerja ini dengan target WTP. Sesuai dengan target yang telah ditentukan juga WTP dengan capaian kinerja sebesar 100%.
 - b. Persentase Kab/Kota dengan Opini WTP ditargetkan 100% dan terealisasi 100% Sama dengan Opini BPK untuk Provinsi, Opini Kab/Kota ini penilaiannya dilakukan pada waktu tahun anggaran pengukuran kinerja ini dengan target WTP.
 - c. Terealisasinya Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebesar -3,31% dari target semula sebesar -8,47%.
 - d. Angka Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2020 ini direalisasikan dengan nilai BAIK, ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu juga bernilai BAIK. Oleh karena itu capaian targetnya adalah sebesar 100%.
 - e. Nilai Akuntabilitas Kinerja ditargetkan A dan terealisasi dengan Nilai A. Nilai ini di dapat berdasarkan hasil evaluasi dari Inspektorat terhadap Laporan Kinerja Tahun 2019.
2. Kinerja sasaran dimaksud diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan yang tertuang dalam Revisi Renstra Badan Keuangan Daerah Tahun 2019, yaitu:
 - a. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah.
 - b. Meningkatnya pendapatan daerah.
 - c. Meningkatnya kinerja organisasi.
5. Pencapaian kinerja sasaran juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap target kinerja Pemerintah Provinsi yang dibebankan kepada Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat yaitu Meningkatnya Status Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi dimana pada tahun 2020 ini ditargetkan memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Berdasarkan uraian di atas, dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perlunya optimalisasi pencapaian kinerja program dan kegiatan pada Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, yang salah satunya dilakukan dengan perencanaan yang baik, menghindari terjadinya kesalahan penganggaran yang mengakibatkan tidak terealisirnya anggaran yang sudah disediakan, penatalaksanaan yang harus sesuai dengan jadwal terutama pada kegiatan yang pelaksanaannya berkaitan dengan pihak lain.
2. Upaya-upaya peningkatan kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah dapat dilakukan antara lain melalui:
 - a. Perencanaan program dan kegiatan secara lebih mantap serta antisipatif sehingga tidak akan mengalami permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya.
 - b. Peningkatan kompetensi SDM khususnya terkait dengan proses pengelolaan pendapatan daerah dan pengelolaan keuangan daerah terutama yang berkaitan dengan pengelolaan data, informasi, dan implementasi sistem informasi.
 - c. Perlunya upaya-upaya perencanaan diklat yang mantap untuk meningkatkan kompetensi aparatur pengelola keuangan daerah, sehingga keberadaan aparat memang betul-betul sesuai dengan kebutuhan organisasi.
3. Seiring dengan sistem komputerisasi yang menjadi tulang punggung dalam sarana dan prasarana, Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat akan senantiasa meningkatkan kapabilitas (kemampuan) Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur, khususnya dalam hal kualitas pelayanan publik.
4. Melaksanakan perbaikan sistem jaringan guna mendukung pengembangan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan dan perbaikan kualitas pelayanan serta pengembangan sarana dan prasarana pelayanan yang berbasis teknologi informasi dan mengembangkan jaringan kerjasama dengan pihak lain.
5. Melaksanakan inovasi-inovasi, baik dalam hal penagihan pajak daerah maupun pelayanan kepada wajib pajak dengan melihat karakteristik dan kultur masyarakat wajib pajak, serta memperhatikan keterbatasan Sumber Daya Manusia Aparatur yang ada.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Instansi Kinerja Pemerintah dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah ditetapkan dan seharusnya dicapai Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Mendorong Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada Peraturan Perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Sumatera Barat terhadap Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat di dalam pelaksanaan program kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

B. GAMBARAN ORGANISASI

1. Dasar Pembentukan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 45 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keuangan Daerah, ditetapkan Badan Keuangan Daerah.

2. Tugas Pokok

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Bab II Bagian Kesatu Pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan daerah.

Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok sebagaimana maksud diatas maka Badan Keuangan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Keuangan Daerah.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang keuangan.
- c. Pembinaan dan Pelaksanaan urusan di bidang keuangan daerah.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Disamping itu sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Badan Keuangan Daerah sebagai PPKD dalam melaksanakan fungsi selaku BUD berwenang :

- a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD.
- b. Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD.
- c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD.
- d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah.
- e. Melaksanakan pemungutan pajak daerah.
- f. Menetapkan SPD.
- g. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah.
- h. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.

Tugas Badan Keuangan Daerah selaku SKPD/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) mempunyai wewenang :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.
- b. Menyusun rancangan APBD dan perubahan APBD.
- c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah.
- d. Melaksanakan fungsi BUD.
- e. Menyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjaewaban pelaksanaan APBD.

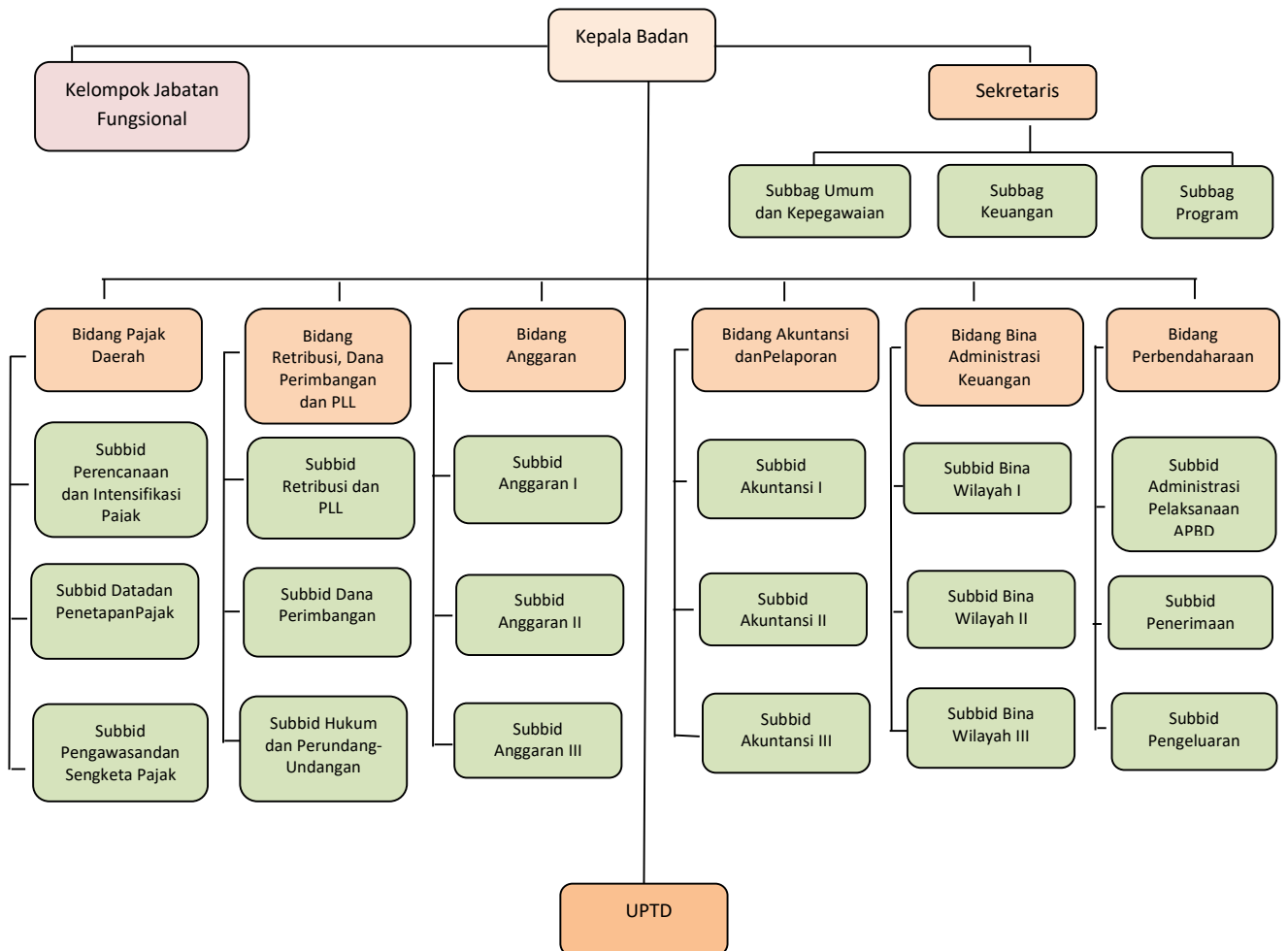
Tugas Badan Keuangan Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mempunyai tugas mengevaluasi Rancangan Perda tentang Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan tugas tersebut di atas, maka Organisasi Badan Keuangan Daerah terdiri dari 1 (satu) Kepala Badan, 1 (satu) Sekretariat, dan 6 (enam) Bidang yaitu : Bidang Pajak Daerah, Bidang Retribusi, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi dan Pelaporan, dan Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah. Sedangkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemungutan pajak, Badan Keuangan Daerah mempunyai 18 (delapan belas) Unit Pelaksana Teknis Daerah yang tersebar pada 18 Kabupaten/Kota (kecuali Mentawai) di Sumatera Barat serta UPTD Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Susunan organisasi Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat secara lengkap disajikan dalam gambar dibawah ini.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi
Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat



4. Sumber Daya Manusia

Pegawai Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat kondisi 31 Desember 2020 sebanyak 246 orang dengan rincian sebagai berikut :

- 242 orang PNS
- 4 orang PTT

Untuk lebih jelasnya kondisi pegawai dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1
Komposisi PNS Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat
Menurut Pendidikan, Pangkat dan Golongan serta Jabatan
Per 31 Desember 2020

NO	GOL	ESELON				NON ESELON		JUMLAH	PENDIDIKAN														TOTAL
		I	II	III	IV	TENAGA FUNKSIONAL	STAF		LAKI-LAKI							PEREMPUAN							
									S-2	S-1	SM/D-III	SLTA	SLTP	SD	JUMLAH	S-2	S-1	SM/D-III	SLTA	SLTP	SD	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	IV/e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IV/d	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	IV/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IV/b	-	-	11	-	2	-	13	5	4	-	-	-	-	9	2	2	-	-	-	-	-	4
	IV/a	-	-	10	13	-	2	25	6	5	-	-	-	-	11	13	1	-	-	-	-	-	14
JUMLAH GOL. IV		-	1	21	13	2	2	39	12	9	-	-	-	-	21	15	3	-	-	-	-	-	18
2	III/d	-	-	1	37	-	17	55	2	22	1	2	-	-	27	3	23	1	1	-	-	-	28
	III/c	-	-	-	17	-	20	37	4	12	1	0	-	-	17	6	14	0	0	-	-	-	20
	III/b	-	-	-	0	-	32	32	0	4	0	12	-	-	16	1	4	0	11	-	-	-	16
	III/a	-	-	-	-	-	43	43	0	21	3	0	-	-	24	0	6	12	0	-	-	-	18
JUMLAH GOL. III		-	-	1	54	-	112	167	6	59	5	14	-	-	84	10	47	13	12	-	-	-	82
3	II/d	-	-	-	-	-	15	15	-	-	-	13	-	-	13	-	-	1	1	-	-	-	2
	II/c	-	-	-	-	-	16	16	-	-	-	15	-	-	15	-	-	1	1	-	-	-	2
	II/b	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	0
	II/a	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	0	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	0
JUMLAH GOL. II		-	-	-	-	-	35	35	-	-	-	31	1	-	32	-	-	2	2	-	-	-	4
4	I/d	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	0
	I/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0
	I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0
	I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0
JUMLAH GOL. I		-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	0
JMLH PTT		-	-	-	-	-	4	1	-	-	-	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	0
JUMLAH		-	1	22	67	2	154	243	18	68	5	49	1	1	142	25	50	15	14	-	-	-	104

Berdasarkan analisis beban kerja telah dilaksanakan, jumlah PNS Badan Keuangan Daerah yang ada per 31 Desember 2020 masih belum mencukupi kebutuhan ideal yaitu sebanyak 556 orang. Mengingat beban kerja sesuai dengan tupoksi masih dibutuhkan tambahan pegawai. Untuk membantu pelaksanaan tugas supaya tetap berjalan sesuai dengan fungsi dilaksanakan dengan merangkap tugas yang dilakukan oleh pegawai yang ada.

C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah " **Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera** ", maka diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Sumatera Barat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya bagi masyarakat Sumatera Barat, memperhatikan RPJMN, RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025. Visi

Pembangunan Provinsi Sumatera Barat tersebut harus dapat diukur keberhasilannya dalam rangka mewujudkan Provinsi Sumatera Barat yang madani dan sejahtera.

Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat tersebut di atas kemudian dijabarkan di dalam misi pembangunan 2016-2021. Misi tersebut adalah:

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah "*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*";
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional;
3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berakarakter, dan berkualitas tinggi;
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pembangunan daerah;
5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.

Selanjutnya berdasarkan visi, misi, dan agenda tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat menetapkan 10 prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Pembangunan mental dan pengamalan agama dan *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat;
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan;
3. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan;
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
5. Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis;
6. Pengembangan pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, UMKM, dan peningkatan investasi;
7. Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan;
8. Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal;
9. Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur;
10. Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.

Tabel 1.2

Keterkaitan RPJMD dengan Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	SKPD
Misi 2 : Meningkatnya tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional				
Prioritas 2 : Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan				
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Peraturan Pengelolaan Pendapatan Daerah 2. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah 3. Pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah 4. Peningkatan kompetensi aparatur pengelola keuangan daerah 5. Pelaksanaan pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kab/Kota yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pendapatan daerah 2. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Pembinaan dan fasilitasi keuangan Kabupaten/Kota 	Fungsi lain (urusan otonomi daerah)	BADAN KEUANGAN DAERAH

Bertitik tolak dari visi, misi, tujuan, prioritas pembangunan, sasaran, strategi dan program pembangunan Pemerintah Daerah inilah kemudian disusun Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah.

Keterkaitan antara RPJMD Provinsi Sumatera Barat dengan Renstra Badan Keuangan Daerah terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 1.3

Keterkaitan antara RPJMD Provinsi Sumatera Barat dengan Renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat

MISI 2 : MENINGKATKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN PROFESIONAL								
PRIORITAS 2 : PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DALAM PEMERINTAHAN								
RPJMD				RENSTRA 2016-2021				
TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM
MENINGKATKAN PENERAPAN REFORMASI BIROKRASI	INDEKS RB	MENINGKATKAN TRANSPARANSI & AKUNTABILITAS DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	OPINI WTP	MENINGKATKAN TRANSPARANSI & AKUNTABILITAS DLM PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	OPINI WTP	MENINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	OPINI BPK THD LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
						MENINGKATKAN KUALITAS APBD KAB/KOTA	PERSentase KAB/KOTA DENGAN OPINI WTP	PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KAB/KOTA
				MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH	PERSentase PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH	MENINGKATKAN PAD	PERSentase PENINGKATAN PAD	PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH
						MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	NILAI IKM	PENILAIAN PELAYANAN PUBLIK
				MENINGKATKAN KINERJA ORGANISASI	NILAI SAKIP	MENINGKATKAN TATA KELOLA ORGANISASI	NILAI SAKIP DAN REALISASI CAPAIAN PROGRAM FISIK DAN KEUANGAN	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA

Dalam Rencana Strategis 2016-2021 Badan Keuangan Daerah menetapkan tujuannya yang tercantum pada tabel berikut.

Tabel 1.4

Tujuan Renstra 2016-2021 Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat

No.	Tujuan Renstra	Tujuan Revisi Renstra sesuai rekomendasi tim penguatan SAKIP November 2019
1.	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah
2.	Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah	Meningkatnya pendapatan daerah
3.	Terwujudnya Peningkatan Kualitas APBD Kabupaten/Kota	Meningkatnya kinerja organisasi
4.	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima Aspiratif dan Partisipatif	

Sementara itu untuk indikator kinerja Pemerintah Provinsi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 1.5
Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Provinsi Sesuai Tupoksi Badan Keuangan Daerah Tahun 2020

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020
1	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan	Opini BPK	WTP

Dalam rangka memenuhi sasaran yang telah ditetapkan maka dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut :

1. Sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, strategi yang dilakukan adalah perencanaan penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan daerah sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Sasaran meningkatnya kualitas APBD Kabupaten/Kota, strategi yang dilakukan adalah evaluasi APBD Kabupaten/Kota sesuai perundang-undangan yang berlaku.
3. Sasaran meningkatnya pendapatan asli daerah, strategi yang dilakukan adalah perbaikan manajemen terhadap semua potensi pendapatan daerah dari pajak, retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah serta intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah dari pajak, retribusi dan lain-lain pendapatan yang sah.
4. Sasaran meningkatnya kualitas pelayan publik, strategi yang dilakukan adalah memenuhi sarana dan prasarana UPTD PPD Badan Keuangan Daerah.
5. Sasaran meningkatnya tata kelola organisasi, strategi yang dilakukan adalah dengan melakukan pembaharuan pada SOP serta evaluasi dan pengawasan.

D. PERMASALAHAN UTAMA (ISU STRATEGIS)

Pelaksanaan kinerja Pemerintah selalu mengalami perubahan untuk mewujudkan tuntutan masyarakat yang selalu mencermati dan memperhatikan kinerja Pemerintah dalam pelayanan. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dimulai dari strukturalisasi kelembagaan, reformasi birokrasi yang dibuat dalam tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan pelayanan yang berorientasi pada

peningkatan kinerja instansi, sehingga terwujud tujuan Pemerintah daerah dalam mencapai Good and Clean Governance. Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi .

1. Masih ada beberapa OPD yang mengirim laporan belum valid dan tidak sesuai standar akuntansi serta belum tepat waktu.
2. Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD masih perlu ditingkatkan.
3. Perlu adanya evaluasi pelaksanaan transaksi non tunai yang berkelanjutan untuk mendukung transparansi keuangan daerah.
4. Kepatuhan Wajib Pajak dalam perhitungan dan pelaporan pajak masih perlu ditingkatkan
5. Belum optimalnya penerimaan pajak daerah, retribusi daerah atau bahkan penerimaan dari hasil kekayaan daerah yang dipisahkan.
6. Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) baik dalam kuantitas maupun kualitas. Disadari bahwa dengan sistem yang masih belum sepenuhnya terintegrasi, jumlah SDM untuk dapat melakukan pemungutan pajak dan retribusi masih sangat kurang. Pemahaman SDM terkait dengan pajak dan retribusi daerah menjadi penting karena SDM di lapangan harus dapat memberi penjelasan yang mudah dimengerti masyarakat. Pemahaman SDM menjadi tombak untuk membangun kesadaran pentingnya membayar pajak dan retribusi dari masyarakat guna menunjang peningkatan kualitas dan kuantitas SDM.
7. Sistem pengendalian internal masih perlu ditingkatkan. Lemahnya pengawasan atas pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Belum efektifnya pengawasan ini juga terjadi pada pengawasan kinerja pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
8. Kurangnya kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam membayar pajak, retribusi dan pungutan lainnya.
9. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) belum banyak memberikan keuntungan kepada Pemerintah Daerah.

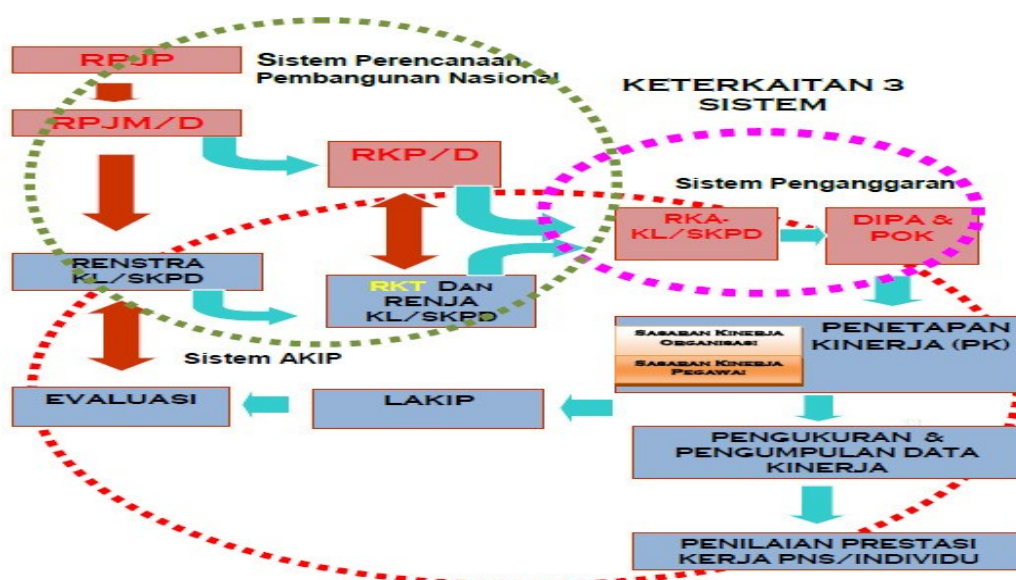
BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibangun dalam rangka upaya mewujudkan *good governance* dan sekaligus *result oriented government*. SAKIP merupakan sebuah sistem dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja (*performance-base management*) untuk penyediaan informasi kinerja guna pengelolaan kinerja.

Upaya penguatan sistem akuntabilitas kinerja di Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat dilakukan secara menyeluruh terutama dengan dibentuknya Tim Penyusunan LAKIP Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan berkoordinasi setiap bidang di Badan Keuangan Daerah dan UPTD Provinsi Sumatera Barat dalam rangka penguatan pada beberapa komponen antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi. Dengan kata lain SAKIP tidak hanya meliputi satu komponen saja sehingga penguatannya memerlukan upaya menyeluruh dari unit organisasi yang terkait.

Gambar 2.1 . SAKIP



Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur berdasarkan tugas dan fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi juga termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan perjanjian kinerja :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas,transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi
4. Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan suvervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

Sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah khususnya perencanaan kinerja, Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat telah membuat Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Gubernur dan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020. Perjanjian Kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 telah ditetapkan dan dimuat dalam Buku Perjanjian Kinerja Provinsi Sumatera Barat (terlampir).

Perjanjian Kinerja disesuaikan dengan susunan agenda, prioritas, sasaran pembangunan pada Renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Secara ringkas, gambaran keterkaitan antara sasaran strategis, indikator kinerja, target, dan program dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN : 2020

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK	WTP	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
				1 Pembinaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	0
				2 Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD	120.684.800
				3 Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Daerah/Negara	0
				4 Bimbingan dan Pelatihan Teknis Peningkatan SDM Berbasis Teknologi Informasi	64.335.900
				5 Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD	858.847.400
				6 Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	866.616.200
				7 Verifikasi DPA-OPD, DPA-OPD Pergeseran dan DPA-OPD Perubahan	383.471.341
				8 Pembinaan Teknis Penyusunan Perencanaan Penganggaran SKPD Dilingkup Provinsi	101.422.400
				9 Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	616.866.900
				10 Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah - SIPKD	684.849.700
				11 Penetapan Pengelolaan Keuangan Penerima	93.875.100

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)
					Hibah, Bantuan Keuangan dan Bantuan Operasional Sekolah	
				12	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Penatausahaan Keuangan kepada OPD Lingkup Provinsi Sumbar	20.002.400
				13	Rekonsiliasi Dana Transfer, Belanja Pegawai dan Daftar Transaksi Harian dan Rekapitulasi Harian	251.229.600
				14	Penyusunan Peraturan Terkait Perencanaan dan Penganggaran	226.409.350
				15	Sosialisasi Peraturan Terkait Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah Kepada OPD Ditingkat	0
				16	Pembahasan RKP-OPD dan DPPA-OPD/RKA-OPD Kegiatan Baru	414.387.350
				17	Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD	252.897.250
				18	Tatakelola Program Hibah Jalan Daerah (PHJD)	180.000.000
2	Meningkatnya Kualitas APBD Kab/Kota	Persentase Kab/Kota dengan Opini WTP	100	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA		
				1	Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD serta Rancangan Perbup/Perwako tentang Penjabaran APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota	381.964.515

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)
				2	Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah se Sumatera Barat	26.225.900
				3	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Kabupaten/Kota	0
				4	Rekapitulasi dan Rekonsiliasi Data APBD Kab/Kota	9.047.400
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK		
				1	Penilaian Pelayanan Publik	0
				2	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Samsat Link	1.240.180.600
4	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	-8,47	PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH		
				1	Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar pengenaan PKB dan BBNKB	119.104.000
				2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai dan Retribusi dan Penerimaan Lain-lain	17.127.000
				3	Peningkatan Pendapatan Dana Perimbangan	35.753.200
				4	Penyusunan Ranperda Retribusi Daerah	204.230.900
				5	Peningkatan dan Penyusunan Rencana Penerimaan Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-Lain	58.683.300
				6	Intensifikasi Peningkatan Pajak Daerah	5.157.078.245

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)
5	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja	A	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	78.018.415

Pada sasaran strategis meningkatnya Pendapatan Asli Daerah di tahun 2019 ini indikator kinerja yang ditetapkan yaitu persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan target awal sebesar 9,5% dan diubah menjadi -8,47. Hampir seluruh sektor ekonomi dan lapangan usaha di Sumatera Barat ikut terdampak pandemi Covid-19, sehingga pada kuartal I dan II laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat mengalami perlambatan dibanding dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Kondisi tersebut tentunya secara langsung akan menimbulkan perlambatan dalam pencapaian target kinerja pendapatan daerah khususnya PAD di tahun berjalan.

Bila dilihat realisasi pencapaian target PAD pada Semester I (sampai akhir Juni 2020) adalah sebesar 43,3% sedangkan realisasi pencapaian target PAD pada periode yang sama sampai akhir Juni 2019 adalah sebesar 44,25%. Pajak Daerah sebagai penyumbang terbesar terhadap PAD sampai dengan akhir Juni 2020 terealisasi sebesar 41,4% sedangkan realisasi Pajak Daerah pada periode yang sama diakhir Juni 2019 realisasinya mencapai 45,93%. Begitu juga dengan Retribusi Daerah pada semester I tahun 2020 hanya sebesar 28,9% sedangkan pada semester I tahun 2019 terealisasi sebesar 33,30%. Fakta tersebut memperlihatkan bahwa terjadinya perlambatan pencapaian target PAD pada semester I tahun 2020 sebagai akibat dari melambatnya pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dimasa pandemi Covid-19.

Dengan memperhatikan perlambatan pertumbuhan ekonomi dan realisasi pendapatan sampai akhir Juni 2020 dan permasalahan tersebut masih akan tetap berlangsung sampai akhir tahun 2020, maka seyogyanya perlu dilakukan koreksi ataupun penyesuaian target pendapatan daerah.

Program, kegiatan dan indikator kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Program, Kegiatan, dan Indikator Kinerja
Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	RENCANA CAPAIAN TARGET
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran untuk kepentingan dinas	%	20%
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terkirimnya surat menyurat ke instansi/lembaga terkait	bulan	12
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya pembayaran tagihan jasa telekomunikasi, air dan listrik	bulan	12
	3 Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor	Terpeliharanya kebersihan, keamanan dan pelayanan kantor berupa penyediaan pengaman kantor, petugas kebersihan dan sopir	orang	- 41 pengaman kantor; - 57 petugas kebersihan; - 27 sopir
	4 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Terlaksananya premi asuransi barang milik daerah	tahun	1
	5 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor dalam rangka pelayanan administrasi kantor	bulan	12
	6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dalam rangka peningkatan pelayanan administrasi kantor dan pajak daerah	bulan	12
	7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Tersedianya komponen instalasi listrik kantor	bulan	12

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	RENCANA CAPAIAN TARGET
	Bangunan Kantor			
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan yang dibutuhkan berupa koran, warta perundang-undangan dan majalah	eksemplar	- 432 koran; - 12 warta; - 24 majalah
9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	kegiatan	- 44 dalam daerah; - 44 luar daerah
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan minum rapat berupa makanan kotak dan snack kotak	kotak	- 2380 makan; - 2380 snack
11	Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi	Terpenuhinya jasa dokumentasi dan informasi berupa publikasi	kali	4
12	Penyediaan Jasa Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	Terlaksananya pembinaan fisik dan mental aparatur	kali	33;
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana aparatur		20%
1	Pengadaan Meubiler	Tersedianya meubiler kantor, diantaranya kursi tunggu, rak file, dan lain-lain	unit	- 20 kursi tunggu; - 5 rak file;
2	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor, diantaranya genset, lemari besi, dan lain-lain	unit	- 3 genset; - 10 lemari besi
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor yang lebih baik	tahun	1
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional yang layak pakai berupa kendaraan	unit	- 34 roda empat; - 20 roda dua;

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	RENCANA CAPAIAN TARGET
III	Dinas/Operasional	roda empat, kendaraan roda dua, dan bus Samkel		- 13 bus Samkel
	5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan kantor	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor dengan baik, diantaranya telepon, TV, dan lain-lain	unit	- 18 telepon; - 32 TV
	6 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terlaksananya perbaikan sedang/berat gedung kantor	unit	2
	7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan jaringan listrik, telepon, dan air	tahun	1
	8 Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya pembangunan kantor UPTD/Samsat	DED	1
	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya disiplin dan etos kerja aparatur		20%
	1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	stel	280
IV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	Meningkatnya wawasan dan kemampuan/ kapasitas sumber daya aparatur		20%
	1 Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan	Tidak terlaksana karena termasuk kegiatan yang terdampak rasionalisasi penanganan Covid-19	-	-
	2 Bimbingan Teknis Implementasi peraturan Perundang-undangan	Tidak terlaksana karena termasuk kegiatan yang terdampak rasionalisasi penanganan Covid-19	-	-
V	PROGRAM PENINGKATAN	Meningkatnya tertib		20%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	RENCANA CAPAIAN TARGET
	PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	administrasi keuangan		
	1 Penyusunan Perencanaan dan Panganggaran SKPD	Tersusunnya laporan penyusunan perencanaan berupa DPA, DPA Pergeseran, DPA Perubahan dan Renja	dokumen	- 50 DPA; - 50 DPA Pergeseran; - 50 DPA Perubahan; - 30 Renja
	2 Penatausahaan Keuangan SKPD	Tersusunnya laporan bendahara pengeluaran dan laporan keuangan	exp	- 36 lprn bend. pengeluaran; - 36 laporan keuangan;
	3 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja keuangan program dan kegiatan	laporan	1
	4 Pengelolaan, Pengawasan, dan Pengendalian Aset SKPD	Terlaksananya pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset SKPD	unit	19
VI	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah		
	1 Pembinaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Tidak terlaksana karena termasuk kegiatan yang terdampak rasionalisasi penanganan Covid-19	-	-
	2 Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD	Terlaksananya penyusunan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021	dokumen	1

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	RENCANA CAPAIAN TARGET
3	Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Daerah/Negara	Tidak terlaksana karena termasuk kegiatan yang terdampak rasionalisasi penanganan Covid-19	-	-
4	Bimbingan Teknis dan Pelatihan Peningkatan SDM Berbasis Teknologi Informasi	Terlaksananya bimbingan teknis untuk tenaga teknis	orang	2
5	Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD	Tersusunnya dokumen keuangan daerah seperti pengantar nota keuangan, nota keuangan, nota jawaban, Peraturan Daerah tentang APBD, dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan	buku; buku; buku; buku; eksemplar	- 110 pengantar nota keuangan; - 110 nota keuangan; - 110 nota jawaban ; - 150 Perda ttg APBD; - 5 laporan
6	Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Tersusunnya pengantar nota keuangan, nota jawaban, Perda tentang perubahan APBD tahun 2019	buku	- 110 pengantar nota keuangan; - 110 nota keuangan; - 110 nota jawaban ; - 150 Perda ttg Perubahan APBD;
7	Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD	Terlaksananya Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019	buku	245
8	Verifikasi DPA-OPD, DPA-OPD Pergeseran dan DPA-OPD Perubahan	Terlaksananya verifikasi DPA-OPD, DPA-OPD Pergeseran dan DPA-OPD Perubahan	SKPD;Biro; PPKD	42;9;1
9	Pembinaan Teknis Penyusunan Perencanaan	Terlaksananya pembinaan dan asistensi terhadap penyusunan perencanaan dan penganggaran	laporan	2

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	RENCANA CAPAIAN TARGET
	Penganggaran OPD di Lingkungan Provinsi	berbasis kinerja bagi OPD dilingkup Provinsi serta terlaksananya pembinaan dan asistensi terhadap penyusunan perencanaan dan penganggaran bantuan keuangan bersifat khusus kepada Kabupaten/Kota		
10	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersusunnya Perda Pertanggungjawaban APBD, Pergub Penjabaran Pertanggungjawaban, dan lain-lain	dokumen	1
11	Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah SIPKD	Terlaksananya pengembangan aplikasi SIPKD sesuai kebutuhan operasional di lapangan	fitur	1
12	Penetapan Pengelolaan Keuangan, Penerima Hibah, Bantuan Keuangan dan Bantuan Operasional Sekolah	Tersedianya dokumen data pengelola keuangan dan penyaluran hibah, bantuan keuangan dan bantuan operasional sekolah dengan dokumen surat keputusan gubernur	dokumen; SK	- 8 dokumen; - 8 SK
13	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Penatausahaan Keuangan Kepada OPD Lingkup Provinsi Sumbar	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Penatausahaan Keuangan terhadap Pejabat Pengelola Keuangan dan Bendahara	org	150
14	Rekonsiliasi Dana Transfer, Belanja Pegawai dan Daftar Transaksi Harian dan Rekapitulasi Harian	Terlaksananya rekonsiliasi dana transfer dan IPDMP, Belanja Pegawai, Daftar Transaksi Hariana, dan Rekapitulasi Transaksi Harian	dokumen	4
15	Penyusunan Peraturan Terkait Perencanaan dan Penganggaran	Terlaksananya penyusunan dokumen deregulasi terkait dengan perencanaan dan penganggaran	dokumen	6

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	RENCANA CAPAIAN TARGET
	16 Sosialisasi Peraturan terkait Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah Kepada OPD di Lingkup Provinsi Sumatera Barat	Tidak terlaksana karena termasuk kegiatan yang terdampak rasionalisasi penanganan Covid-19	-	-
	17 Pembahasan RKP-OPD dan DPPA-OPD/RKA-OPD Kegiatan Tahun 2019	Terlaksananya pembahasan RKA OPD dan DPA opd Tahun 2021 sesuai dengan perundang-undangan	SKPD;Biro; PPKD	42;9;1
	18 Tatakelola Program Hibah Jalan Daerah (PHJD)	Terlaksananya tatakelola keuangan program hibah jalan daerah dan tersedianya laporan	dokumen	2
VII	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KAB/KOTA	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan APBD Kab/Kota sesuai dengan ketentuan		
	1 Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD serta Rancangan Perbup/Perwako tentang Penjabaran APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDKabupaten/Kota	Diterbitkannya SK Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perbup/Wako tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota tahun 2021	dokumen	3
	2 Rapat Koordinasi Pengelola Keuangan Daerah Se-Sumatera Barat	Terlaksananya Rapat Koordinasi pengelola keuangan daerah se Sumatera Barat	kegiatan	1 FGD

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	RENCANA CAPAIAN TARGET
	3 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kab/Kota	Tidak terlaksana karena termasuk kegiatan yang terdampak rasionalisasi penanganan Covid-19	-	-
	4 Rekapitulasi dan Rekonsiliasi Data APBD Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen APBD Kabupaten/Kota	dokumen	7
VIII	PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya Pendapatan Daerah		
	1 Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB	Tersedianya satubuku Peraturan Gubernur tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor	dokumen	1
	2 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai dan Retribusi dan Penerimaan Lain-Lain	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Cukai dan Retribusi dan Penerimaan Lain-Lain	angkatan	1
	3 Peningkatan Pendapatan Dana Perimbangan	Tersedianya laporan realisasi penerimaan dana perimbangan, laporan rekonsiliasi data DBH	dokumen; Berita Acara	- 2 dokumen; - 5 Berita Acara
	4 Penyusunan Ranperda Retribusi Daerah	Terlaksananya penyusunan Ranperda Retribusi dan PLL, Naskah Akademik dan Peraturan Gubernur	Perda; Naskah Akademik; Pergub	- 2 Perda; - 1 Naskah Akademik; - 2 Pergub
	5 Peningkatan dan Penyusunan Rencana Penerimaan Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-Lain	Tersedianya laporan koordinasi, evaluasi rencana penerimaan retribusi tahun 2020	dokumen	4
	6 Intensifikasi Peningkatan Pajak	Terlaksananya intensifikasi peningkatan pajak daerah, berupa		

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	RENCANA CAPAIAN TARGET
	Daerah	(PKB, BBNKB, PBBKB, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok)		
IX	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kepatuhan Pelaksanaan Undang-Undang Pelayanan Publik		
	1 Penilaian Pelayanan Publik	Tidak terlaksana karena termasuk kegiatan yang terdampak rasionalisasi penanganan Covid-19	-	-
	2 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Samsat Link	Aplikasi Samsat Link berjalan dengan baik	tahun	1

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. METODE PENGUKURAN

Pengukuran Kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun anggaran dan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016–2021, hitungannya dengan menggunakan :

- $(\text{Realisasi/Target} \times 100\%)$ untuk capaian $>$ adalah baik
- $\frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$ untuk capaian $<$ adalah baik

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan yang dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang diperoleh melalui data internal yang ditetapkan oleh instansi yaitu berasal dari Badan Keuangan Daerah, maupun data eksternal yang berasal dari luar instansi.

Pengumpulan data kinerja dilakukan untuk memperoleh data yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang berguna dalam pengambilan keputusan dan

penyusunan rencana kegiatan untuk tahun berikutnya. Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator-indikator masukan, keluaran, dan hasil, dilakukan secara terencana dan sistematis setiap tahun untuk mengukur kehematan, efektivitas, efisiensi, dan kualitas pencapaian sasaran. Sedangkan pengumpulan data kinerja untuk indikator manfaat dan dampak dapat diukur pada akhir periode selesainya suatu program atau dalam rangka mengukur pencapaian tujuan-tujuan instansi pemerintah, dalam hal ini adalah Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Pengukuran kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dan masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka pengukuran kinerja dilakukan terhadap pencapaian sasaran strategis yang ada, yang disampaikan dalam Formulir Pengukuran Kinerja (PK).

Berdasarkan hasil-hasil perhitungan pengukuran kinerja kegiatan, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang.

Evaluasi kinerja dilakukan terhadap analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasinya. Evaluasi dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat, atau dampak. Evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya kendala maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan- perbandingan antara lain:

- a. Kinerja nyata dengan target kinerja yang direncanakan.
- b. Kinerja nyata dengan hasil kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- c. Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- d. Kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan standar internasional.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) harus menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Analisis akuntabilitas kinerja meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dalam analisis ini dijelaskan pula perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif, sesuai dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis dilakukan dengan menggunakan informasi/data yang diperoleh secara lengkap dan akurat, dan bila memungkinkan dilakukan pula evaluasi kebijakan untuk mengetahui ketepatan dan efektivitas baik untuk kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya.

Skala penilaian terhadap kinerja pemerintah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1
Penilaian Kinerja

No.	Klasifikasi	Predikat	Kode
1.	85% - 100%	Sangat Baik	
2.	69% - 84%	Baik	
3.	53% - 68%	Cukup	
4.	< 53%	Gagal	

B. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja yang dilakukan berupa pengukuran pencapaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2020. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja pada kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran pencapaian indikator kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan mencapai sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Keuangan Daerah.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis ditentukan oleh pencapaian kelompok atau indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan. Untuk analisis atau penjelasan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dengan mempedomani target kinerja pada masing masing indikator yang telah ditentukan.

Sasaran strategis Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 yang terdiri dari 1) Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah; 2) Meningkatnya Kualitas APBD Kabupaten/Kota; 3) Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah 4) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik; dan 5) Meningkatnya Tata Kelola Organisasi. Setiap sasaran strategis diukur pencapaian kerjanya/tingkat keberhasilannya dengan salah satu atau lebih indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis tersebut, sedangkan setiap indikator kinerja pencapaiannya ditentukan oleh satu bagian atau lebih yang melaksanakan program dan kegiatan yang relevan.

Untuk mengukur sejauh apa pelaksanaan program dengan perencanaan yang disesuaikan dengan sasaran yang telah di gambar diatas maka perlu dibandingkan antara perencanaan yang telah ditetapkan dengan realisasi pencapaian sasaran sebagaimana yang telah dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Daerah. Hal ini juga akan menggambarkan konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan kinerja program dan kegiatan oleh Badan Keuangan Daerah.

Tabel 3.2 dibawah ini menggambarkan hasil pengukuran kinerja Badan Keuangan Daerah tahun 2020.

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja
Badan Keuangan Daerah Tahun 2020

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENGUKURAN KINERJA	
			TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	- Opini BPK	WTP	WTP
2	Meningkatnya Kualitas APBD Kabupaten/Kota	- Persentase Kabupaten/Kota dengan Opini WTP	100	100
3	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	- Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	-8,14	-3,31
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	- Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik
5	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	- Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	A	A

C. CAPAIAN KINERJA

Gambaran capaian kinerja Badan Keuangan Daerah tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.3
Capaian Kinerja
Badan Keuangan Daerah Tahun 2020

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		
			TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	- Opini BPK	WTP	WTP	100
2	Meningkatnya Pendapatan Asli	- Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	-8,14	-3,31	160

	Daerah				
3	Meningkatnya Kualitas APBD Kabupaten/Kota	- Persentase Kabupaten/ Kota dengan Opini WTP	100	100	100
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	- Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	100
5	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	- Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	A	A	100

Analisis dan Kajian Capaian Kinerja Sasaran Strategis yang dicerminkan oleh realisasi target Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2020 ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Pada sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat bahwa indikator kinerjanya adalah opini BPK dengan target WTP. Adapun realisasi sasaran strategis meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.4
Pengukuran Kinerja
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2020

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		
			TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK	WTP	WTP	100

Opini BPK disamping indikator kinerja Pemerintah Daerah juga merupakan indikator kinerja Badan Keuangan Daerah, karena ini merupakan salah satu indikator dari sasaran strategis yaitu meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah. Pada tahun 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, dan 2018 realisasi indikator kinerjanya WTP dengan capaian 100%. Pada tahun 2018 Pemerintah Sumatera Barat juga mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Pusat yang mana penghargaan itu didapat karena Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah berhasil mempertahankan

opini WTP 6 kali berturut turut. Di Indonesia didapat oleh 8 (delapan) Provinsi, yaitu Prov. Sumbar, Prov. Kep.Riau, Prov. Jabar, DI.Yogyakarta, Prov. NTB, Prov. Kalsel, Prov. Sulteng dan Prov. Gorontalo. Penghargaan tersebut diserahkan bertepatan dengan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2018 pada tanggal 20 September 2018 di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Gambar 3.1.

Penghargaan Pemerintah RI kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat atas Capaian Opini WTP Lima Tahun Berturut-turut (2013-2017)



Pada tanggal 3 November 2019 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga mendapat penghargaan dari Indonesia Award 2019 Tata Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik di Jakarta. Disamping itu Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menerima penghargaan dari media GATRA kategori Opimalisasi Anggaran. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Direktur Utama Media Group, Hendri Firzani kepada Gubernur Irwan Prayitno di Bogor tanggal 1 Desember 2019.

Untuk mencapai opini WTP, seluruh SKPD mempunyai peranan penting, dimana dengan tiga SKPD yang menjadi penanggungjawabnya yaitu Badan Keuangan Daerah, Biro AP2BMD, dan Inspektorat. BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan yang terdiri dari 7 (tujuh) laporan yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah memuat opini BPK. Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada 4 (empat) kriteria yakni :

- a. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah
- b. Kecukupan pengungkapan
- c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
- d. Dan efektifitas sistem pengendalian intern.

Pada tahun 2020, BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian. Opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut sudah sesuai dengan target yang ditetapkan dan merupakan pencapaian untuk kedelapan kalinya sejak laporan keuangan tahun 2012. Keberhasilan Pemda Sumatera Barat dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut didukung dengan faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Adanya penyesuaian regulasi pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan akuntansi karena adanya perubahan regulasi yang dilakukan oleh pemerintah.
- b. Adanya upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan yang berdampak pada peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan.
- c. Adanya dukungan aplikasi yang terintegrasi sejak penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban yang semakin baik sehingga laporan

dapat diselesaikan tepat waktu dan meminimalkan terjadi kesalahan-kesalahan baik pada tahap penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban.

- d. Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern (APIP) dalam pelaksanaan pengendalian internal pemerintah daerah.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Badan Keuangan Daerah untuk mempertahankan Opini BPK adalah:

- a. Untuk validnya data/angka dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu Angka Realisasi Pendapatan, Angka Realisasi Belanja, Angka Realisasi Pembiayaan, maka dilakukan sebagai berikut:
 - Rekonsiliasi pendapatan dan belanja (LRA) Pemda setiap bulannya antara Bidang Akuntansi dan Pelaporan dengan Bidang Perbendaharaan (selaku Bendahara Umum Daerah);
 - Rekonsiliasi atas pemungutan perhitungan Pihak Ketiga pada belanja pegawai dengan BPJS Kesehatan dan PT. Taspen;
 - Rekonsiliasi Daftar Transaksi Harian Pajak dan rekonsiliasi Harian Pajak atas belanja pada APBD Provinsi Sumatera Barat dengan OPD dan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI melalui KPKN;
 - Rekonsiliasi posisi kas daerah dengan PT. BPD Sumatera Barat (Bank Nagari);
 - Rekonsiliasi dana perimbangan DAK Non Fisik dengan Kementerian Keuangan RI dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan RI;
 - Rekonsiliasi pendapatan pajak daerah setiap bulannya antara Bidang Akuntansi dan Pelaporan dengan Bidang Pajak Daerah dan Bendahara Penerimaan Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat;
 - Rekonsiliasi Bidang Akuntansi dan Pelaporan dengan 49 SKPD (yang memiliki DPA dan melaksanakan anggaran).
 - Melakukan asistensi dan fasilitasi kepada SKPD terkait penyusunan laporan keuangan.
- b. Untuk validnya data/angka dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu Angka Aset Tetap, Aset Lainnya, Investasi Jangka Panjang dan Hutang, maka dilakukan sebagai berikut:

- Rekonsiliasi antara Bidang Akuntansi dan Pelaporan dengan SKPD dan Biro AP2BMD (untuk Aset Tetap);
 - Rekonsiliasi Bidang Akuntansi dan Pelaporan dengan SKPD dan Biro Perekonomian serta Bank Nagari (untuk Dana Bergulir).
- c. Untuk membantu SKPD dalam melaksanakan penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan, maka Badan Keuangan Daerah melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis kepada Bendahara, PPK, dan Sekretaris seluruh SKPD.
 - d. Untuk memudahkan SKPD dalam menyusun RKA, DPA, membuat SPP, SPM, dan SP2D menyusun SPJ serta menyusun Laporan Keuangan SKPD berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca, maka selalu dilaksanakan Update Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Pemerintah Daerah (SIPKD) dan dilaksanakan bimbingan teknis kepada seluruh operator SIPKD, yaitu Operator Anggaran, Operator Penatausahaan dan Operator Pertanggungjawaban.
 - e. Untuk mengawasi penatausahaan dan pelaksanaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh SKPD yaitu oleh PA, KPA, PPTK, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Barang, dan Pengurus Barang maka dilakukan pengawasan oleh Inspektorat sesuai dengan Program Kegiatan Pemeriksaan Tahunan (PKPT) yang telah ditetapkan kepada seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
 - f. Untuk meyakinkan bahwa Laporan Keuangan yang telah disusun oleh SKPD dan Pemerintah Daerah telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, maka telah dilakukan Reviu oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat baik Semesteran, Laporan Keuangan SKPD maupun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
 - g. Untuk menyelesaikan permasalahan aset dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, maka dilakukan dengan menyusun Rencana Aksi Penyelesaian Masalah Aset Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan dibawah koordinasi Biro AP2BMD.
 - h. Selain itu juga dilakukan pendampingan secara terus menerus melalui group *Whatsapp* yaitu *Help Desk* SIPKD. Di grup ini apabila SKPD menemui masalah akan dapat ditindaklanjuti langsung oleh admin SIPKD.

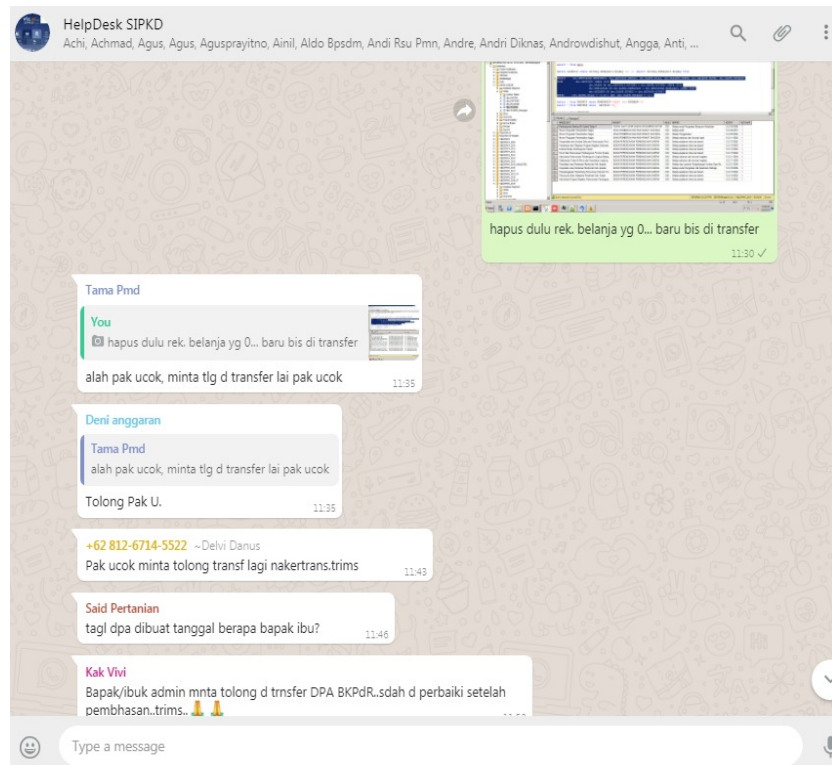
Faktor penghambat untuk mempertahankan Opini BPK :

- a. Peraturan perundang-undangan, sistem, dan mekanisme tata kelola keuangan, yang meliputi penatausahaan, penganggaran dan pertanggungjawaban pelaporan keuangan, serta pengelolaan aset daerah yang belum dipahami secara menyeluruh oleh SKPD.
- b. Kurang maksimalnya koordinasi dalam proses penyusunan anggaran, penyusunan laporan keuangan serta penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan aset daerah.
- c. Adanya peraturan perundang-undangan atau ketentuan peraturan lainnya pada tahun berjalan tidak disertai dengan petunjuk pelaksanaan yang jelas, sehingga menyulitkan dalam pemahaman dan implementasi.

Upaya untuk mempertahankan Opini BPK di masa yang akan datang:

- a. Adanya penyesuaian regulasi pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan akuntansi karena adanya perubahan regulasi yang dilakukan oleh pemerintah.
- b. Adanya upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan yang berdampak pada peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan.
- c. Adanya dukungan aplikasi yang terintegrasi sejak penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban yang semakin baik sehingga laporan dapat diselesaikan tepat waktu dan meminimalkan terjadi kesalahan-kesalahan baik pada tahap penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban.
- d. Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern (APIP) dalam pelaksanaan pengendalian internal pemerintah daerah.
- e. Menyelesaikan tindak lanjut dari BPK-RI dan menyikapi rekomendasi BPK yang tertuang dalam surat Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat TA 2019 agar kedepannya dapat meminimalisir kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan sehingga opini BPK yaitu WTP di masa mendatang dapat dipertahankan.
- f. Selain itu juga dilakukan pendampingan secara terus menerus melalui group *Whatsapp* yaitu *Help Desk* SIPKD. Di grup ini apabila SKPD menemui masalah akan dapat ditindaklanjuti langsung oleh admin SIPKD.

Gambar 3.2
Screenshoot Whatsapp Group Helpdesk SIPKD



Program/kegiatan dan Anggaran dengan sasaran ini adalah:

Program : Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan :

- a. Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dengan anggaran sebesar Rp. 858.847.400,-
- b. Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD dengan anggaran sebesar Rp. 120.684.800,-
- c. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan anggaran sebesar Rp. 866.616.200,-
- d. Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan anggaran sebesar Rp. 252.897.250,-
- e. Verifikasi DPA-OPD, DPPA-OPD dan Pergeseran DPA-OPD dengan anggaran sebesar Rp. 383.471.341,-

- f. Bimbingan Teknis dan Pelatihan Peningkatan SDM Berbasis Teknologi Informasi dengan anggaran sebesar Rp. 64.335.900,-
- g. Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dengan anggaran sebesar 684.849.700,-
- h. Penetapan Pengelola Keuangan, Penerima Hibah, Bantuan Keuangan dan Bantuan Operasional dengan anggaran sebesar Rp. 93.875.100,-
- i. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Penatausahaan Keuangan Kepada OPD Lingkup Provinsi Sumatera Barat dengan anggaran sebesar Rp. 20.002.400,-
- j. Rekonsiliasi Dana Transfer, Belanja Pegawai dan Daftar Transaksi Harian dan Rekapitulasi Harian dengan anggaran sebesar Rp. 251.229.600,-
- k. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan anggaran sebesar Rp. 616.866.900,-

b. Meningkatnya Kualitas APBD Kabupaten/Kota

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa Pemerintah Provinsi selaku wakil Pemerintah Pusat di daerah berkewajiban melakukan pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayahnya dan PP Nomor 13 Tahun 2018 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Pembinaan tersebut diwujudkan dalam bentuk supervisi, asistensi, fasilitasi, evaluasi, yang pada akhirnya akan bermuara kepada beberapa indikator kinerja yang menggambarkan komposisi ideal sebuah APBD di Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Outcome dari program ini yaitu meningkatnya pengelolaan kualitas APBD Kabupaten/Kota. Adapun realisasi sasaran strategis meningkatnya kualitas APBD Kabupaten/Kota tahun 2020 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 3.5
Pengukuran Kinerja
Meningkatnya Kualitas APBD Kabupaten/Kota Tahun 2019

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		
			TARGET	REALISASI	%
2	Meningkatnya Kualitas APBD Kabupaten/Kota Meningkatnya Kualitas APBD Kabupaten/Kota	- Persentase Kabupaten/Kota dengan opini WTP	100	100	100

Untuk penilaian indikator ini diambil dari laporan keuangan Kab/Kota tahun sebelumnya yang telah diaudit oleh BPK, sebab apabila diambil data tahun yang bersangkutan maka data yang diperlukan belum tersedia karena ketika laporan kinerja ini dibuat pemeriksaan terhadap laporan keuangan Kab/Kota sedang berjalan. Untuk itu tahun 2020 memakai hasil pemeriksaan tahun 2019 yang mana hasil pemeriksaan tahun 2019 keluarnya pada bulan Juni tahun 2020. Pada tahun 2017 persentase Kab/Kota yang berhasil meraih opini BPK dengan Opini WTP ditargetkan 85%, dan realisasinya yaitu 90%, dimana dari 19 Kab/Kota ada 2 Kab/Kota yang meraih penilaian WDP yaitu Kab Solok dan Kab. Kepulauan Mentawai. Di tahun 2018 persentase Kab/Kota dengan opini WTP ditargetkan 90% dan realisasi 100%. Tahun 2019 opini BPK untuk seluruh Pemerintah Kab/Kota di Sumatera Barat hasilnya adalah WTP yang keluar tahun 2020.

Program/kegiatan dan Anggaran dengan sasaran ini adalah:

Program : Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

Kegiatan :

- a. Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD, Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD serta Rancangan Perbup/Perwako tentang Penjabaran APBD, Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 381.964.515,-
- b. Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah se Sumatera Barat dengan anggaran sebesar Rp. 26.225.900,-

- c. Rekapitulasi dan Rekonsiliasi Data APBD Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 9.047.400,-

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mempertahankan Opini BPK Kab/Kota :

- a. Adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan yang berdampak pada peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan dalam bentuk sosialisasi dan asistensi dalam penyusunan Perda APBD Kab/Kota.
- b. Melakukan sosialisasi terhadap regulasi yang terbaru

c. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Kebijakan Peningkatan Pendapatan asli daerah tahun 2020 adalah :

- 1) Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan serta penyederhanaan sistem prosedur pelayanan.
- 2) Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya.
- 3) Peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran.
- 4) Melaksanakan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak melalui *drive thru*, Samsat Keliling, Gerai Samsat, Samsat CFD, Samsat Malam Minggu, Samsat Nagari, Samsat MPP dan pengembangan Samsat Online.
- 5) Penyebarluasan informasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat.
- 6) Revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya diantaranya pengelolaan BUMD secara profesional, peningkatan sarana, prasarana, kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan sehingga mampu bersaing dan mendapat kepercayaan dari perbankan.
- 7) Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada

peningkatan pendapatan asli daerah.

- 8) Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, dengan POLRI dan Kabupaten/Kota termasuk dengan daerah perbatasan, dalam operasional pemungutan dan pelayanan Pendapatan Daerah, serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan OPD penghasil.
- 9) Kerja sama dengan Kementerian Keuangan cq. Dirjen Pajak untuk melakukan sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan pajak penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak.
- 10) Mengadakan rapat koordinasi bersama Kanwil Pajak Sumbar-Jambi dengan Badan Pendapatan Kabupaten/Kota se Sumateara Barat, untuk melakukan pembinaan dan pengawasan serta memonitor penyetoran PPh Pasal 21 dari perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Sumatera Barat.

Adapun realisasi sasaran strategis meningkatnya pendapatan asli daerah dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.6
Pengukuran Kinerja
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		
			TARGET	REALISASI	%
3	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	- Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	-8,47	-3,31	160

Pendapatan Asli Daerah (PAD), dalam APBD Murni Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp.2.528.472.797.867,00 pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp.2.174.615.145.097,00 sedangkan realisasinya tercapai sebesar 103,50 persen dari target yang telah ditetapkan dengan sektor Pajak Daerah menjadi penyumbang utama yaitu sebesar 80,41 persen terhadap PAD. Pencapaian tersebut tidak lepas dari inovasi dalam pelayanan pajak daerah. Target, realisasi dan

kontribusi masing-masing rincian PAD terhadap total PAD Tahun Anggaran 2020 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.7
Target, Realisasi, dan Kontribusi Rincian PAD Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran 2020

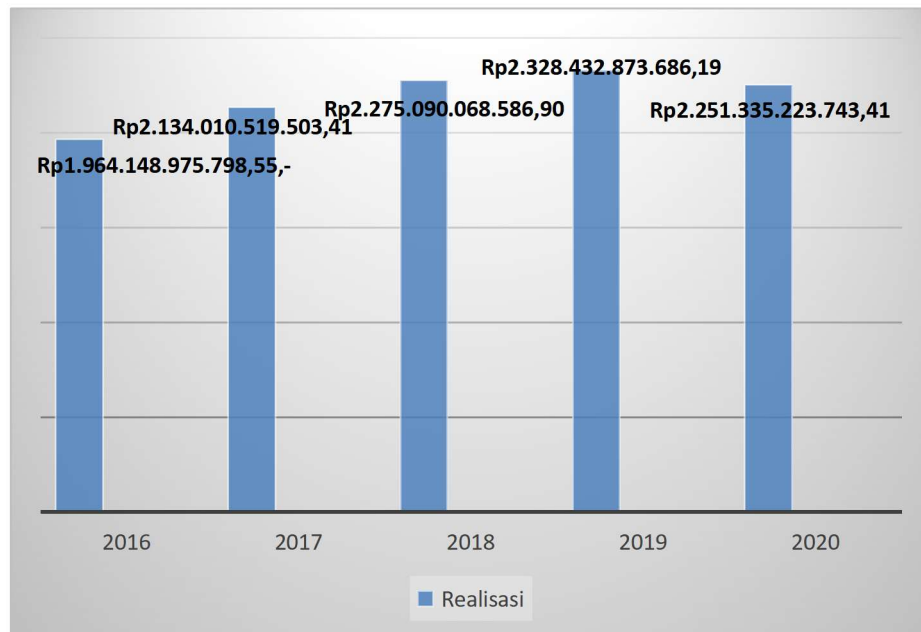
Uraian	APBD Tahun Anggaran 2020		Realisasi		Kontribusi terhadap PAD (%)
	Murni (Rp)	Perubahan (Rp)	Rp	%	
Pajak Daerah	1.956.425.000.000,00	1.729.790.540.000,00	1.809.807.023.047,00	104,63	80,41
Retribusi Daerah	11.377.502.768,00	8.533.127.076,00	7.926.595.873,00	92,89	0,35
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	110.239.356.256,00	103.900.375.092,00	94.747.256.568,00	91,19	4,21
Lain-lain PAD Yang Sah	450.430.938.843,00	332.391.102.929,00	338.854.348.255,41	101,79	15,03
Jumlah PAD	2.528.472.797.867,00	2.174.615.145.097,00	2.251.335.223.743,41	103,50	100,00

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 sebelum Audit BPK RI

Tabel 3.8
Perbandingan Peningkatan PAD Tahun 2016-2019

Tahun	Realisasi	Perbandingan peningkatan realisasi PAD dari tahun sebelumnya
2016	Rp. 1.964.148.975.798,55	4,66%
2017	Rp. 2.134.010.519.503,41	8,65%
2018	Rp. 2.275.090.068.586,90	6,61%
2019	Rp. 2.328.432.873.686,19	2,34%
2020	Rp. 2.251.335.223.743,41	-3,31%
Rata-rata		3,79%

Grafik 3.1
Peningkatan PAD Tahun 2016-2020



Peningkatan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah ini semuanya diperoleh dari kegiatan intensifikasi yang dilakukan melalui berbagai upaya yaitu :

1. Peningkatan Pelayanan melalui :

- Optimalisasi operasional kegiatan Samsat Keliling dengan menyediakan pelayanan bus yang lengkap dengan peralatannya dimana sampai tahun ini sudah tersedia sebanyak 13 unit bus, yang memberikan pelayanan mudah dan cepat kepada masyarakat yang ingin melakukan perpanjangan ulang kendaraan bermotor yang dimilikinya serta perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) melalui Bus Samsat Keliling pada lokasi-lokasi yang telah ditentukan. Pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dengan Samsat Keliling ini dilaksanakan pada 18 UPTD. Dengan adanya Pelayanan Samsat Keliling ini, diharapkan masyarakat dapat memperoleh manfaat sebagai berikut : a) Memberikan kemudahan kepada masyarakat (Wajib Pajak) dalam pengurusan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) setiap tahun, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLL); dan b)

Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat atau wajib pajak sehingga menghemat waktu dan mengurangi biaya.

- Mengoperasikan Layanan Samsat *Drive Thru* yang telah ada di Kota Padang dan Bukittinggi, dan pada tahun 2019 ini sudah dibangun samsat *Drive Thru* di Payakumbuh dan tahun 2020 sudah operasional
- Galeri Samsat merupakan salah satu produk yang diluncurkan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang bertujuan untuk semakin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang mereka miliki. Saat ini Galeri Samsat baru sebanyak 2 unit yaitu di Kota Padang yang terletak di Plaza Andalas Padang Lantai 3 Nomor 23C, serta 1 unit di Kota Bukittinggi yang terletak di Plaza Bukittinggi lantai 2 Blok B31 dan B32.
- Operasional Fitur Samsat *Anywhere* diresmikan pada tanggal 8 Desember 2016, dimana sebelum ini pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor hanya dapat dilakukan pada Kantor Samsat atau pos pembayaran lainnya tempat kendaraan tersebut terdaftar. Kebutuhan untuk melakukan pembayaran tanpa dibatasi oleh regional dimana kendaraan tersebut terdaftar semakin hari semakin dibutuhkan, sehingga dengan adanya fasilitas ini batasan regional tidak ada lagi.
- Pada tanggal 18 September 2017 telah diresmikan Samsat Nagari. Samsat Nagari ini merupakan pelayanan yang lebih didekatkan lagi kepada masyarakat, dimana masyarakat dapat membayar pajak di Kantor Nagari setempat. Pada saat itu Samsat Nagari baru beroperasi di 2 Nagari yaitu: Nagari Koto Baru di Kab. Solok dan Nagari Pasir Talang Barat di Kab. Solok Selatan. Peresmian Samsat Nagari Ini juga dihadiri oleh Kepala Korp Lalu Lintas Polisi Republik Indonesia Irjen Pol Drs. Royke Lumowa M.M, selain itu juga diresmikan oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat, Kapolda Sumbar dan Kepala Cabang PT Jasa Raharja.
- Tahun 2020 Samsat Nagari berjumlah 6 unit. Adapun Kab/Kota yang telah memiliki Samsat Nagari adalah :
 - a. Kabupaten Solok
 - b. Kabupaten Solok Selatan

- c. Kabupaten Painan
- d. Kabupaten Dharmasraya
- e. Kabupaten Pasaman
- f. Kabupaten Lima Puluh Kota

2. **Melakukan pengawasan yang terdiri dari :**

- Mengintensifkan pelaksanaan razia bersama dengan instansi kepolisian terhadap kendaraan yang sudah dipindahtangankan untuk membaliknamakan kepemilikan kendaraan yang diadakan diseluruh UPTD.
- Monitoring tata tertib administrasi pemungutan dan penatausahaan di seluruh UPTD.
- Mengintensifkan pengiriman Surat Pemberitahuan Pajak Kendaraan Bermotor di masing-masing UPTD/Samsat yang merupakan pemberitahuan kepada wajib pajak satu bulan sebelum tanggal jatuh tempo kendaraannya.
- Mengintensifkan pengiriman Surat Peringatan Pajak Daerah di masing-masing UPTD/Samsat, yaitu memberikan peringatan kepada wajib pajak agar membayar pajak yang telah jatuh tempo.
- Melakukan sosialisasi melalui *mass media*, brosur, spanduk, serta papan reklame.
- Memaksimalkan penerapan aplikasi e-Samsat untuk kemudahan dalam monitoring penerimaan dari layanan masyarakat (wajib pajak).

Sampai saat ini Pendapatan Asli Daerah masih didominasi oleh Pajak Daerah. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.9
Perkembangan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2016-2020

Tahun	Realisasi	Perbandingan peningkatan realisasi pajak daerah dari tahun sebelumnya
2016	1.522.119.229.710,59	5,29%
2017	1.626.923.373.074,36	6,89%
2018	1.797.677.158.644,93	10,50%
2019	1.872.933.990.718,00	4,19%
2020	1.809.807.023.047,00	-3,37%
Rata – rata		4,70%

Grafik 3.2
Perkembangan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2016-2020



Program/kegiatan dan Anggaran dengan sasaran ini adalah:

Program : Peningkatan Pendapatan Daerah

Kegiatan :

- a. Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB dengan anggaran sebesar Rp. 119.104.000,-
- b. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai dan Retribusi dan Penerimaan Lain-lain dengan anggaran sebesar Rp. 17.127.000,-
- c. Peningkatan Pendapatan Dana Perimbangan dengan anggaran sebesar Rp. 35.753.200,-
- d. Penyusunan Ranperda Retribusi Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 204.230.900,-
- e. Peningkatan dan Penyusunan Rencana Penerimaan Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-lain dengan anggaran sebesar Rp. 58.683.300,-
- f. Intensifikasi Peningkatan Pajak Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 5.157.078.245,-

d. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Dalam masa pandemi covid-19 Strategi pelaksanaan transformasi penyelenggaraan pelayanan publik dalam tatanan normal baru Badan Keuangan Daerah melaksanakan dalam bentuk :

1. Proses bisnis

Melakukan penyederhanaan proses dan standar operasional prosedur pelayanan dengan menggunakan Teknologi Informasi Komunikasi. Salah satu yaitu dengan menggunakan aplikasi SALMONAS menggunakan HP Android. Dimana pada aplikasi ini dapat dilakukan pembayaran pajak secara online.

2. Publikasi

Untuk informasi yang baru disampaikan kepada masyarakat dengan menggunakan media publikasi seperti radio.

3. Pengaduan online

Bagi wajib pajak yang kurang puas terhadap pelayanan pajak dapat menggunakan media sistem online berupa SPAN LAPOR dan CHAT ONLINE dengan situs [www//dpkdsumbar.go.id](http://dpkdsumbar.go.id)

4. Protokol kesehatan

Melaksanakan protokol kesehatan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan untuk pelayanan wajib pajak.

Untuk mengukur sasaran strategis kualitas pelayanan pelayanan publik yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi. Sumbar terhadap wajib pajak biasanya dilakukan dengan melakukan survei IKM. Tahun 2020 ini dianggarkan kegiatan survei IKM tapi karena adanya refofusing anggaran maka kegiatan tersebut tidak ada, tapi mengingat tingkat kepuasan masyarakat merupakan sasaran strategis Badan Keuangan Daerah maka dilakukan dengan cara menggunakan kartu puas , kurang puas, dan tidak puas yang ditetapkan pada tempat pelayanan pajak.

Metode yang dipakai dalam menentukan seberapa puas masyarakat menerima pelayanan yang telah diberikan oleh UPTD Badan Keuangan Daerah. Berupa memberikan partisipasi dengan memilih Kartu Puas, Kurang Puas dan Tidak Puas sesuai dengan warna masing-masing, lalu memasukkannya ke dalam Kotak

pelayanan. Dengan memberikan warna Merah = Tidak Puas , Kuning = Kurang Puas dan Hijau = Puas

Kepuasan Pelayanan adalah salah satu bentuk konkrit yang dilaksanakan oleh seluruh UPTD. Untuk mengetahui indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilihat dari hasil rekap kartu yang ada dalam kotak pelayanan yang diberikan oleh masyarakat yang dilaksanakan pada 18 UPTD PPD Badan Keuangan Daerah. Dari hasil kartu tersebut direkap datanya, dimana hasil indeks kepuasan pelayanan secara keseluruhan adalah berupa puas dengan kategori B.

Gambaran kinerja meningkatnya kualitas pelayanan publik dapat dilihat pada tabel dibawah .

Tabel 3.10
Pengukuran Kinerja
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		
			TARGET	REALISASI	%
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	- Indek Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	100

Program/kegiatan dan Anggaran dengan sasaran ini adalah:

Program : Peningkatan Pelayanan Publik

Kegiatan :

- a. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Samsat Link dengan anggaran sebesar Rp. 1.240.180.600,-

e. Tata Kelola Organisasi

Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja ini pengukurannya diambil dari penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap laporan kinerja SKPD tahun sebelumnya. Dimana nilai yang diambil adalah nilai tahun lalu. Pada tahun 2016 yang lalu nilai kinerja dari Badan Keuangan Daerah mendapat nilai 78,77% dan berada dalam katagori penilaian BB. Dan di tahun 2017 kemaren mendapatkan nilai 81,26% atau dengan kategori A. Tahun 2018 nilai 83,01% dengan kategori A. Tahun 2019 dengan nilai 83,20 dengan nilai A.

Tabel 3.11
Nilai Evaluasi Akuntabilitas

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		
			TARGET	REALISASI	%
5	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	- Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	A	A	100

D. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan tujuan yang telah ditetapkan maka Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan program kerja untuk mencapai sasaran sesuai tupoksi dan dibiayai dengan dana APBD 2020, seperti terurai dalam program berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
6. Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan.

7. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota.
8. Program Peningkatan Pendapatan Daerah.
9. Program Penilaian Pelayanan Publik.

Sebagaimana diketahui Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Tahun Anggaran 2020 mendapat pagu anggaran APBD sebesar Rp. 81.470.501.464,- dengan realisasi sebesar Rp. 78.458.144.623,- (96,30%). Berikut terinci pagu dana dan realisasi tahun 2020 dimaksud.

Tabel 3.12
Realisasi Belanja
Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

NO	URAIAN BELANJA	TARGET (Rp)	REALISASI		
			% FISIK	KEUANGAN (Rp)	%
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	50.763.388.129,-	100,00	50.087.111.674,-	98,67
	a. Gaji dan Tunjangan	16.919.057.725,-	100,00	16.592.581.076,-	98,07
	b. Tambahan Penghasilan PNS	5.756.814.204,-	100,00	5.615.753.396,-	97,55
	c. Insentif Pemungutan Pajak Daerah	28.087.516.200,-	100,00	27.878.777.202,-	99,26
2.	BELANJA LANGSUNG	30.707.113.335,-	100,00	28.371.032.949,-	92,39
	JUMLAH BELANJA	81.470.501.464,-	100,00	78.458.144.623,-	96,30

Alokasi anggaran program dan kegiatan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020 adalah Program dan Kegiatan Pokok yang mempunyai 5 program dan 27 kegiatan, sedangkan untuk Program dan Kegiatan pada Belanja Langsung Urusan sebanyak 4 program dengan 30 kegiatan.

Untuk lebih jelasnya realisasi anggaran per program Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.13
Realisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2020	REALISASI		
			FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	BELANJA LANGSUNG POKOK	18.321.822.584,-	100	17.165.168.706,-	93,69
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10.856.269.767,-	100	10.344.570.679,-	95,29
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.643.027.137,-	100	5.098.102.970,-	90,34
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	194.250.000,-	100	185.102.000,-	95,29
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	100	0	0
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1.628.275.680,-	100	1.537.393.057,-	94,42
	BELANJA LANGSUNG URUSAN	12.385.290.751,-		11.205.864.243,-	90,48
1	Program Peningkatan Pendapatan Daerah	5.591.976.645,-	100	5.002.235.788,-	89,45
2	Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan	5.135.895.691,-	100	4.662.443.220,-	90,48
3	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	417.237.815,-	100	401.414.518,-	96,21
4	Program Peningkatan Pelayanan Publik	1.240.180.600,-	100	1.139.770.717,-	91,90
	JUMLAH	30.707.113.335,-	100	28.371.032.949,-	92,39

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2020 sebesar 92,39% dari total anggaran yang dialokasikan. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran strategis, penyerapan anggaran terbesar pada Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan

Keuangan Kabupaten/Kota sebesar 96,21% dan diikuti dengan Program Peningkatan Pelayanan Publik 91,90%, lalu Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan 90,48% dan Program Peningkatan Pendapatan Daerah 89,45%.

Capaian kinerja program/kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2020 sesuai dokumen anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.14
Capaian Kinerja Program/Kegiatan Sesuai Dokumen Anggaran

No	Program/ Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Penunjang OPD						
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kegiatan Penunjang OPD	12 bulan	12 bulan	100	6.150.000,00	5.846.432,00	95,06
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kegiatan Penunjang OPD	12 bulan	12 bulan	100	3.048.392.000,00	2.766.705.151,00	90,76
3	Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor	Kegiatan Penunjang OPD	Penyediaan : - pengaman kantor 41 orang; - petugas kebersihan 57 orang; - sopir 27 orang	Tersedianya : - pengaman kantor 41 orang; - petugas kebersihan 57 orang; - sopir 27 orang	100	57.768.000,00	57.761.000,00	99,99
4	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Kegiatan Penunjang OPD	1 tahun	1 tahun	100	3.000.000,00	600.000,00	20,00
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kegiatan Penunjang OPD	12 bulan	12 bulan	100	516.960.000,00	515.120.000,00	99,64
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kegiatan Penunjang OPD	12 bulan	12 bulan	100	836.869.000,00	830.435.600,00	99,23
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kegiatan Penunjang OPD	12 bulan	12 bulan	100	75.947.600,00	74.656.600,00	98,30

8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kegiatan Penunjang OPD	Tersedianya : - koran 432 eks; - warta perundang-undangan 12 eks - majalah 24 eks	Tersedianya : - koran 432 eks; - warta perundang-undangan 12 eks - majalah 24 eks	100	57.768.000,00	57.761.000,00	99,99
9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Kegiatan Penunjang OPD	Terlaksananya a koordinasi dan konsultasi ke - dalam daerah 24 eks - luar daerah 44 kali	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke - dalam daerah 24 eks - luar daerah 44 kali	100	1.414.567.252,00	1.249.860.134,00	88,36
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kegiatan Penunjang OPD	Tersedianya: - makan rapat 2380 kotak - snack rapat 2380 kotak	Tersedianya: - makan rapat 2380 kotak - snack rapat 2380 kotak	100	118.144.000,00	100.793.800,00	85,31
11	Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi	Kegiatan Penunjang OPD	Terpenuhinya jasa dokumentasi dan informasi berupa publikasi sebanyak 4 kali	Terpenuhinya jasa dokumentasi dan informasi berupa publikasi sebanyak 4 kali	100	10.000.000,00	2.500.000,00	25,00
12	Penyediaan Jasa Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	Kegiatan Penunjang OPD	Terlaksananya a pembinaan fisik dan mental aparaturnya sebanyak 33 kali	Terlaksananya pembinaan fisik dan mental aparaturnya sebanyak 33 kali	100	137.400.000,00	129.685.797,00	94,39
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kegiatan Penunjang OPD						
1	Pembangunan Gedung	Kegiatan Penunjang OPD	Terlaksananya a pembangunan kantor UPTD/Samsat berupa 1 DED UPTD PPD di Solok	Terlaksananya pembangunan kantor UPTD/Samsat berupa 1 DED UPTD PPD di Solok	100	114.101.800,00	113.949.600,00	99,87
2	Pengadaan Meubiler	Kegiatan Penunjang OPD	Tersedianya: - kursi tunggu 20 unit - rak file 5 unit - dll	Tersedianya: - kursi tunggu 20 unit - rak file 5 unit - dll	100	445.960.000,00	435.336.000,00	97,62
3	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kegiatan Penunjang OPD	Tersedianya: - genset 3 unit - lemari besi 10 unit - dll	Tersedianya: - genset 3 unit - lemari besi 10 unit - dll	100	2.431.164.175,00	2.143.058.500,00	88,15
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala	Kegiatan Penunjang	1 tahun	1 tahun	100	606.661.000,00	563.949.818,00	92,96

	Gedung Kantor	OPD						
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Operasional/ Dinas	Kegiatan Penunjang OPD	Terlaksananya a pemeliharaan kendaraan dinas berupa: - roda empat 34 unit - roda dua 20 unit - bus Samkel 13 unit	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas berupa: - roda empat 34 unit - roda dua 20 unit - bus Samkel 13 unit	100	742.168.200,00	620.920.676,00	83,66
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan kantor	Kegiatan Penunjang OPD	Terpeliharanya a peralatan dan perlengkapan kantor berupa: - telepon 18 unit - TV 32 unit - dll	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor berupa: - telepon 18 unit - TV 32 unit - dll	100	525.750.000,00	474.961.511,00	90,34
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan	Kegiatan Penunjang OPD	1 tahun	1 tahun	100	369.757.448,00	363.848.465,00	98,40
8	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Kegiatan Penunjang OPD	Terlaksananya a rehab Kantor UPTD/Samsat sebanyak unit	Terlaksananya rehab Kantor UPTD/Samsat sebanyak unit	100	407.464.514,00	382.078.400,00	93,77
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kegiatan Penunjang OPD						
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kegiatan Penunjang OPD	280 stel	280 stel	100	194.250.000,00	185.102.000,00	95,29
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kegiatan Penunjang OPD						
	Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan	Kegiatan Penunjang OPD	Tidak terlaksana karena termasuk kegiatan yang terdampak rasionalisasi penanganan Covid-19	Tidak terlaksana karena termasuk kegiatan yang terdampak rasionalisasi penanganan Covid-19				
	Bimbingan Teknis Implementasi peraturan Perundang-undangan	Kegiatan Penunjang OPD	Tidak terlaksana karena termasuk kegiatan yang terdampak	Tidak terlaksana karena termasuk kegiatan yang terdampak rasionalisasi				

			rasionalisasi penanganan Covid-19	penanganan Covid-19				
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Program Penunjang OPD						
1	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Kegiatan Penunjang OPD	Tersusunnya laporan penyusunan perencanaan berupa DPA, DPA Pergeseran, DPA Perubahan dan Renja masing-masing sebanyak 50;50;50;30 dokumen	Tersusunnya laporan penyusunan perencanaan berupa DPA, DPA Pergeseran, DPA Perubahan dan Renja masing-masing sebanyak 50;50;50;30 dokumen	100	82.100.100,00	77.766.308,00	94,72
2	Penatausahaan Keuangan SKPD	Kegiatan Penunjang OPD	Tersusunnya laporan bendahara pengeluaran dan laporan keuangan masing-masing sebanyak 36 eksemplar	Tersusunnya laporan bendahara pengeluaran dan laporan keuangan masing-masing sebanyak 36 eksemplar	100	1.209.144.829,00	1.139.152.667,00	94,21
3	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kegiatan Penunjang OPD	1 laporan	1 laporan	100	78.018.451,00	75.696.000,00	97,02
4	Pengelolaan, Pengawasan, dan Pengendalian Aset SKPD	Kegiatan Penunjang OPD	Terlaksananya pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset SKPD sebanyak 19 unit	Terlaksananya pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset SKPD sebanyak 19 unit	100	259.012.300,00	244.778.082,00	94,50
VI	Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah							
1	Pembinaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Badan Layanan Umum	Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah	Tidak terlaksana karena termasuk kegiatan yang	Tidak terlaksana karena termasuk kegiatan yang berdampak				

	Daerah (BLUD)	Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, Perda Nomor 10 Tahun 2008	terdampak rasionalisasi penanganan Covid-19	rasionalisasi penanganan Covid-19				
2	Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD	Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, Perda Nomor 10 Tahun 2008	1 dokumen	1 dokumen	100	120.684.800,00	119.388.252,00	98,93
3	Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Daerah/Negara		Tidak terlaksana karena termasuk kegiatan yang terdampak rasionalisasi penanganan Covid-19	Tidak terlaksana karena termasuk kegiatan yang terdampak rasionalisasi penanganan Covid-19				
4	Bimbingan Teknis dan Pelatihan Peningkatan SDM Berbasis Teknologi Informasi	1. PMK Nomor 74/PMK.07/2016 2. Pergub Nomor 31 Tahun 2019 tentang Tata cara Penyelenggaraan Sistem informasi Keuangan Daerah dan 3. Pergub Nomor 32 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Sistem Manunggal Satu Atap Berbasis elektronik	Terlaksananya bimbingan teknis untuk 2 orang tenaga teknis	Terlaksananya bimbingan teknis untuk 2 orang tenaga teknis	100	64.335.900,00	35.612.803,00	55,35
5	Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD	Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, Perda Nomor	Tersusunnya dokumen keuangan daerah seperti pengantar nota keuangan sebanyak 110 buku,	Tersusunnya dokumen keuangan daerah seperti pengantar nota keuangan sebanyak 110 buku, nota keuangan 110 buku, nota	100	858.847.400,00	796.971.149,00	92,80

		10 Tahun 2008	nota keuangan 110 buku, nota jawaban 110 buku, Peraturan Daerah tentang APBD 150 buku, dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan 5 eksemplar	jawaban 110 buku, Peraturan Daerah tentang APBD 150 buku, dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan 5 eksemplar				
6	Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, Perda Nomor 10 Tahun 2008	Tersusunnya pengantar nota keuangan sebanyak 110 buku, nota keuangan 110 buku, nota jawaban 110 buku, Perda tentang perubahan APBD tahun 2021 150 buku	Tersusunnya pengantar nota keuangan sebanyak 110 buku, nota keuangan 110 buku, nota jawaban 110 buku, Perda tentang perubahan APBD tahun 2021 150 buku	100	866.616.200,00	800.354.200,00	92,35
7	Verifikasi DPA-OPD, DPA-OPD Pergeseran dan DPA-OPD Perubahan	Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, Perda Nomor 10 Tahun 2008	Terlaksananya a verifikasi DPA-OPD, DPA-OPD Pergeseran dan DPA-OPD Perubahan	Terlaksananya verifikasi DPA-OPD, DPA-OPD Pergeseran dan DPA-OPD Perubahan	100	383.471.341,00	378.248.341,00	98,64
8	Pembinaan Teknis Penyusunan Perencanaan Penganggaran OPD di Lingkungan Provinsi	Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, Perda Nomor 10 Tahun 2008	Terlaksananya a pembinaan dan asistensi terhadap penyusunan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja bagi OPD dilingkup Provinsi serta terlaksananya a pembinaan dan asistensi terhadap penyusunan perencanaan dan	Terlaksananya pembinaan dan asistensi terhadap penyusunan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja bagi OPD dilingkup Provinsi serta terlaksananya pembinaan dan asistensi terhadap penyusunan perencanaan dan penganggaran bantuan	100	101.422.400,00	93.142.323,00	91,84

			penganggara n bantuan keuangan bersifat khusus kepada Kabupaten/K ota berupa 2 laporan	keuangan bersifat khusus kepada Kabupaten/Kot a berupa 2 laporan				
9	Penyusunan Laporan Pertanggungj awaban Pelaksanaan APBD		Tersusunnya Perda Pertanggungj awaban APBD, Pergub Penjabaran Pertanggungj awaban, dan lain-lain berupa 1 dokumen	Tersusunnya Perda Pertanggungj awaban APBD, Pergub Penjabaran Pertanggungj awaban, dan lain-lain berupa 1 dokumen	100	616.866.900,00	529.922.200,00	85,91
10	Pengembang an Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah SIPKD	PMK Nomor 74/PMK.o7/20 16 2.Pergub Nomor 31 Tahun 2019 tentang Tata cara Penyelenggar aan Sistem informasi Keuangan Daerah	Terlaksanany a pengembang an aplikasi SIPKD sesuai kebutuhan operasional di lapangan berupa 1 fitur	Terlaksananya pengembang an aplikasi SIPKD sesuai kebutuhan operasional di lapangan berupa 1 fitur	100	684.849.700,00	639.118.334,00	93,32
11	Penetapan Pengelolaan Keuangan, Penerima Hibah, Bantuan Keuangan dan Bantuan Operasional Sekolah	- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD sebagaiman a telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012. - Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor	Tersedianya dokumen data pengelola keuangan dan penyaluran hibah, bantuan keuangan dan bantuan operasional sekolah dengan dokumen surat keputusan gubernur berupa 8 dokumen,da n 8 SK	Tersedianya dokumen data pengelola keuangan dan penyaluran hibah, bantuan keuangan dan bantuan operasional sekolah dengan dokumen surat keputusan gubernur berupa 8 dokumen,dan 8 SK	100	93.875.100,00	89.756.405,00	95,61

		25 Tahun 2013 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial						
12	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Penatausahaan Keuangan Kepada OPD Lingkup Provinsi Sumbar	<p>- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012.</p> <p>- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 25 Tahun 2013 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial</p>	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Penatausahaan Keuangan terhadap Pejabat Pengelola Keuangan dan Bendahara	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Penatausahaan Keuangan terhadap Pejabat Pengelola Keuangan dan Bendahara		20.002.400,00	17.706.000,00	88,52
13	Rekonsiliasi Dana Transfer, Belanja Pegawai dan Daftar	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05/2013 tentang	Terlaksananya rekonsiliasi dana transfer dan IPDMP, Belanja Pegawai,	Terlaksananya rekonsiliasi dana transfer dan IPDMP, Belanja Pegawai,	100	251.229.600,00	226.085.870,00	89,99

	Transaksi Harian dan Rekapitulasi Harian	Mekanisme Pengawasan terhadap Pemotongan/ Pemungutan dan Penyetoran Pajak yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD/Kuasa BUD.	Daftar Transaksi Hariana, dan Rekapitulasi Transaksi Harian berupa 4 dokumen	Daftar Transaksi Hariana, dan Rekapitulasi Transaksi Harian berupa 4 dokumen				
14	Penyusunan Peraturan Terkait Perencanaan dan Penganggaran	Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, Perda Nomor 10 Tahun 2008	Terlaksananya penyusunan dokumen deregulasi terkait dengan perencanaan dan penganggaran berupa 6 dokumen	Terlaksananya penyusunan dokumen deregulasi terkait dengan perencanaan dan penganggaran berupa 6 dokumen	100	226.409.350,00	153.391.860,00	67,75
15	Sosialisasi Peraturan terkait Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah Kepada OPD di Lingkup Provinsi Sumatera Barat		Tidak terlaksana karena termasuk kegiatan yang terdampak rasionalisasi penanganan Covid-19	Tidak terlaksana karena termasuk kegiatan yang terdampak rasionalisasi penanganan Covid-19				
16	Pembahasan RKP-OPD dan DPPA-OPD/RKA-OPD Kegiatan Tahun 2019	Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, Perda Nomor 10 Tahun 2008	Terlaksananya pembahasan RKA OPD dan DPA OPD Tahun 2021 sesuai dengan perundang-undangan	Terlaksananya pembahasan RKA OPD dan DPA OPD Tahun 2021 sesuai dengan perundang-undangan	100	414.387.350,00	381.093.350,00	91,97
17	Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD	Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, Perda Nomor 10 Tahun	Terlaksananya Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 berupa	Terlaksananya Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 berupa	100	252.897.250,-	235.060.000,-	92,95

		2008	245 buku	245 buku				
18	Tatakelola Program Hibah Jalan Daerah (PHJD)	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Menteri Keuangan Nomor S-2/MK.07/2020 tanggal 4 Februari 2020 tentang Penetapan Pemberian Hibah untuk Program Hibah Jalan Daerah dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2020. - Amandemen 2 Januari 2020 Manual Manajemen Program (Program Managemen t Manual/PM M) Program Hibah Jalan Daerah. - Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk Program Hibah Jalan Daerah Nomor PHD-06/MK.07/2020 tanggal 13 Maret 2020 	Terlaksananya tatakelola keuangan program hibah jalan daerah dan tersedianya laporan berupa 2 dokumen	Terlaksananya tatakelola keuangan program hibah jalan daerah dan tersedianya laporan berupa 2 dokumen	100	180.000.000,-	166.592.143,00	92,00
VII	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota							

1	Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD serta Rancangan Perbup/Perwako tentang Penjabaran APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Diterbitkannya SK Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perbup/Wako tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota tahun 2021 berupa 3 dokumen	Diterbitkannya SK Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perbup/Wako tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota tahun 2021 berupa 3 dokumen	100	381.964.515,00	368.276.896,00	96,42
2	Rapat Koordinasi Pengelola Keuangan Daerah Se-Sumatera Barat	-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 91 s/d 93 dan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 Pasal 309 dan 310	Terlaksananya Rapat Koordinasi pengelola keuangan daerah se Sumatera Barat berupa 1 kegiatan FGD	Terlaksananya Rapat Koordinasi pengelola keuangan daerah se Sumatera Barat berupa 1 kegiatan FGD	100	26.225.900,00	26.225.900,00	100
3	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kab/Kota	-	Tidak terlaksana karena termasuk kegiatan yang terdampak rasionalisasi penanganan Covid-19	Tidak terlaksana karena termasuk kegiatan yang terdampak rasionalisasi penanganan Covid-19				
4	Rekapitulasi dan Rekonsiliasi Data APBD Kabupaten/Kota	Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat	Tersedianya dokumen APBD Kabupaten/Kota berupa 7 dokumen	Tersedianya dokumen APBD Kabupaten/Kota berupa 7 dokumen	100	9.047.400,00	6.911.722,00	76,39

VIII	Program Peningkatan Pendapatan Daerah							
1	Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB	Permendagri Nomor 8 Tahun 2020	1 dokumen	1 dokumen	100	119.104.000,00	114.436.325,00	96,08
2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai dan Retribusi dan Penerimaan Lain-Lain		1 angkatan	1 angkatan	100	17.127.000,00	16.173.250,00	94,43
3	Peningkatan Pendapatan Dana Perimbangan		Tersedianya laporan realisasi penerimaan dana perimbangan, laporan rekonsiliasi data DBH masing-masing berupa 2 dokumen, 5 Berita Acara, dan 2 rapat rekon	Tersedianya laporan realisasi penerimaan dana perimbangan, laporan rekonsiliasi data DBH masing-masing berupa 2 dokumen, 5 Berita Acara, dan 2 rapat rekon	100	35.753.200,00	22.513.377,00	62,97
4	Penyusunan Ranperda Retribusi Daerah		Terlaksananya penyusunan Ranperda Retribusi dan PLL, Naskah Akademis dan Peraturan Gubernur berupa 2 Perda, 1 Naskah Akademis, dan 2 Pergub	Terlaksananya penyusunan Ranperda Retribusi dan PLL, Naskah Akademis dan Peraturan Gubernur berupa 2 Perda, 1 Naskah Akademis, dan 2 Pergub	100	204.230.900,00	187.012.165,00	97,39
5	Peningkatan dan Penyusunan Rencana Penerimaan Retribusi		Tersedianya laporan koordinasi, evaluasi rencana penerimaan tahun 2020	Tersedianya laporan koordinasi, evaluasi rencana penerimaan tahun 2020 sebanyak 4	100	58.683.300,00	56.522.900,00	96,32

	Daerah dan Penerimaan Lain-Lain		sebanyak 4 dokumen	dokumen				
6	Intensifikasi Peningkatan Pajak Daerah	Perda No 4 Tahun 2011 dan Perda Nomor 1 Tahun 2012	Terlaksananya intensifikasi peningkatan pajak daerah, berupa (PKB, BBNKB, PBBKB, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok) sebesar Rp. 1.729.790.540.000,-	Terlaksananya intensifikasi peningkatan pajak daerah, berupa (PKB, BBNKB, PBBKB, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok) sebesar Rp. 1.809.808.841.129,-	104,63%	5.157.078.245,00	4.605.577.771,00	89,31
IX	Program Peningkatan Pelayanan Publik							
1	Penilaian Pelayanan Publik		Tidak terlaksana karena termasuk kegiatan yang terdampak rasionalisasi penanganan Covid-19	Tidak terlaksana karena termasuk kegiatan yang terdampak rasionalisasi penanganan Covid-19				
2	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Samsat Link	1. Perpres Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor 2. Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik 2. Pergub Nomor 32/Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Sistem Manunggal Satu Atap Berbasis Elektronik	Aplikasi Samsat Link berjalan dengan baik selama 1 tahun	Aplikasi Samsat Link berjalan dengan baik selama 1 tahun	100	1.240.180.600,00	1.139.770.717,00	91,90

Instrumen pendukung pengelola data keuangan dan Samsat pada Badan Keuangan Daerah sebagai berikut :

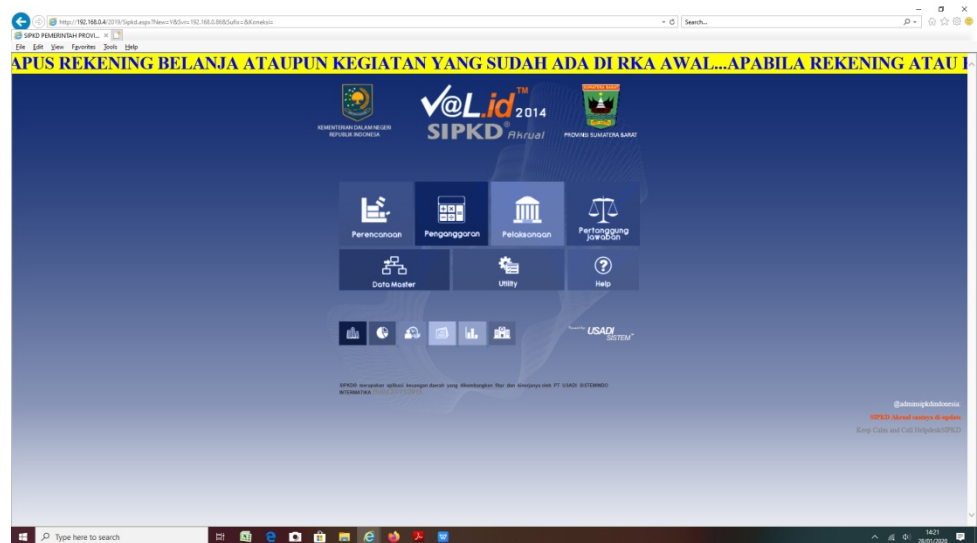
- a. *Website* Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat
Website ini berfungsi untuk menginformasikan segala kegiatan dan produk-produk yang dihasilkan oleh Badan Keuangan Daerah yang dapat diakses melalui <http://dpkdsumbar.go.id>.

Gambar 3.3
Website Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat

[illegible]

- b. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) secara *integrated* dan *online*, digunakan oleh seluruh OPD dalam penyusunan anggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan. Sistem ini merupakan alat bantu dalam penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban APBD. Sistem ini operasionalnya simpel dan mudah digunakan.

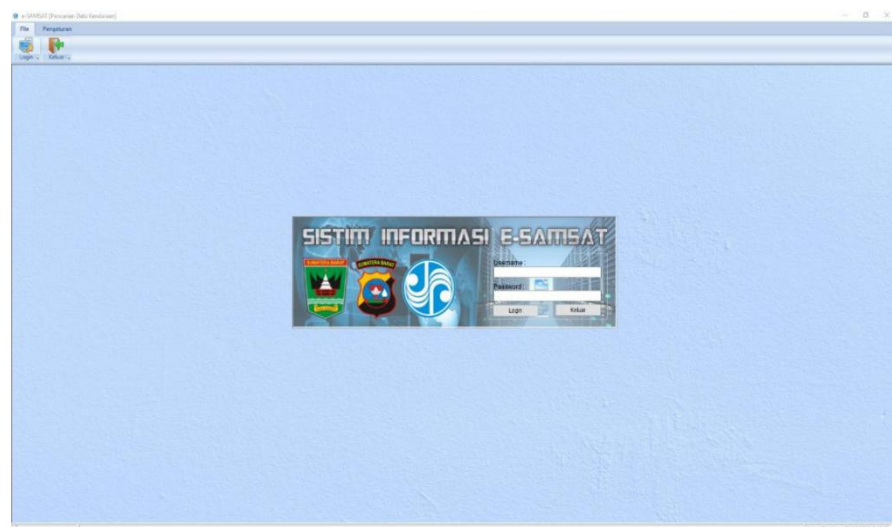
Gambar 3.4
Aplikasi SIPKD Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat



c. Sistem aplikasi e-SAMSAT

Aplikasi Sentralisasi e-SAMSAT merupakan suatu aplikasi yang digunakan untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada kantor SAMSAT. Dimana 18 cabang SAMSAT hanya mengakses 1 database yang berada di kantor UPTD Sistem Informasi Keuangan Daerah Sumatera Barat.

Gambar 3.5
Sistem Aplikasi e-SAMSAT



E. INOVASI

Inovasi dimaknai sebagai penemuan baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang ada atau belum ada. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas. Tantangan global dalam penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparaturnya untuk bergerak dinamis dan kreatif. Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat langsung maupun tidak langsung. Sebagai bentuk komitmen Badan Keuangan Daerah dalam mewujudkan pelayanan yang prima Badan Keuangan Daerah membuat inovasi dalam pelayanan Samsat maupun keuangan. Inovasi yang dibuat ditujukan untuk mencapai keberhasilan capaian kinerja yang telah ditetapkan. Untuk tahun 2020 ini Badan Keuangan Daerah tingkat Provinsi Sumatera Barat mendapat mengeluarkan empat inovasi yaitu Senda e-Samsat (Sentralisasi Database Aplikasi e-Samsat), Samsat CFD (*Car Free Day*), Samsat Malaming (Samsat Malam minggu), dan Transaksi Non Tunai. Adapun inovasi Badan Keuangan Daerah dapat dilihat dalam lampiran.

F. EVALUASI KINERJA

Bentuk evaluasi kinerja yang dilakukan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat berupa pertemuan evaluasi secara triwulan yang langsung dipimpin oleh Kepala Badan. Pertemuan dilakukan untuk melihat pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Dalam evaluasi ini jika ada permasalahan atau kendala dalam pelaksanaan tugas maka dicarikan solusi atau pemecahannya dalam bentuk diskusi. Untuk melihat pencapaian program dan kegiatan biasanya langsung dimonitor oleh Kepala Badan lewat sistem yang ada. Untuk tahun 2020 ini bentuk evaluasi banyak dilakukan dalam bentuk vitcom karena wabah pandemi covid-19. Dalam pelaksanaan sistem kerja dalam bentuk koordinasi/rapat dengan OPD lain menggunakan teleconference. Untuk pelayanan antar OPD dibatasi pelayanan tatap muka pelayanan dilakukan dengan menggunakan IT dalam bentuk email, WA maupun telepon.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 merupakan cerminan capaian kinerja kegiatan dan sasaran tahun 2020 berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja) yang telah disusun sebelumnya. Laporan Kinerja Badan Keuangan Daerah disusun berdasarkan Laporan Capaian Kinerja yang dilaksanakan oleh bidang-bidang unit kerja dan UPTD PPD yang ada di lingkungan Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dengan demikian Laporan Kinerja Badan Keuangan Daerah merupakan laporan terintegrasi dan terkonsolidasi (*integrated and consolidated report*) terhadap pencapaian kinerja bidang-bidang maupun UPTD PPD di Sumatera Barat secara keseluruhan.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap laporan kinerja dari unit-unit kerja dan keterkaitan antara realisasi Renstra dan Renja dengan tingkat capaiannya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap unit kerja baik Bidang maupun UPTD berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Lima Tahunan Badan Keuangan Daerah 2016 – 2021. Program-program tersebut meliputi 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur; 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; 6) Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah; 7) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota; 8) Program Peningkatan Pendapatan Daerah; dan 9) Program Peningkatan Pelayanan Publik;

2. Adapun pencapaian kinerja input/penyerapan anggaran Badan Keuangan Daerah Tahun 2020 terhadap Belanja Langsung adalah sebesar 92,39% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 30.77.113.335,-. Capaian kinerja input tertinggi Belanja Langsung Urusan terdapat pada Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota sebesar 96,21% dan diikuti dengan Program Peningkatan Pelayanan Publik 91,90%, lalu Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan 90,78% dan yang terendah Program Peningkatan Pendapatan Daerah 89,45%.
3. Pelaksanaan Program dan Kegiatan sebagaimana poin diatas telah memberikan kontribusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Sasaran dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Realisasi Opini BPK diharapkan realisasinya tahun ini adalah WTP. Sesuai dengan target yang telah ditentukan juga WTP dengan capaian kinerja sebesar 100%.
 - b. Terealisasinya Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebesar -3,31% dari target semula sebesar -8,47%, maka dapat disimpulkan capaian kinerjanya sebesar 160%.
 - c. Realisasi Persentase Kabupaten/Kota dengan Opini WTP adalah 100% dari target 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%
 - d. Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat adalah Baik dari target baik dengan capaian kinerja sebesar 100%.
 - e. Realisasi Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja terealisasi A sesuai target yang ditetapkan yaitu A dengan capaian kinerja sebesar 100%.
4. Kinerja sasaran dimaksud adalah pencapaian tujuan yang tertuang dalam Renstra Badan Keuangan Daerah yaitu:
 - a. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah.
 - b. Meningkatnya pendapatan daerah.
 - c. Meningkatnya kinerja organisasi.
5. Pencapaian kinerja sasaran juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap Target Kinerja Pemerintah Provinsi yang dibebankan kepada Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat yaitu Meningkatnya Status Opini BPK Terhadap

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi yang pada tahun 2020 ini ditargetkan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian.

B. LANGKAH-LANGKAH DI MASA MENDATANG

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan kinerja organisasi dimasa mendatang adalah sebagai berikut:

1. Perlunya optimalisasi pencapaian kinerja program dan kegiatan pada Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, yang salah satunya dilakukan dengan perencanaan yang baik untuk menghindari terjadinya kesalahan penganggaran yang mengakibatkan tidak terealisirnya anggaran yang sudah disediakan, serta penatalaksanaan yang harus sesuai dengan jadwal terutama pada kegiatan yang pelaksanaannya berkaitan dengan pihak lain.
2. Upaya-upaya peningkatan kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah dapat dilakukan antara lain melalui:
 - a. Penyesuaian regulasi pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan akuntansi karena adanya perubahan regulasi yang dilakukan oleh pemerintah
 - b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan yang berdampak pada peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan.
 - c. Adanya dukungan aplikasi yang terintegrasi sejak penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban yang semakin baik sehingga laporan dapat diselesaikan tepat waktu dan meminimalkan terjadi kesalahan-kesalahan baik pada tahap penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban.
3. Melaksanakan inovasi-inovasi, baik dalam hal penagihan pajak daerah maupun pelayanan kepada wajib pajak dengan melihat karakteristik dan kultur masyarakat wajib pajak, serta memperhatikan keterbatasan Sumber Daya Manusia Aparatur yang ada.